

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM
(STUDI TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KECAMATAN MANDAU
KELURAHAN GAJAH SAKTI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Penyusunan Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau

MIFTAH SURGANA
157310500

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan segala Puji dan Syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini yang Berjudul : “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum” Penulis menyadari bahwa dalam Proses Studi maupun dalam Proses Penulisan dan Penyelesaian Penelitian ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubung dengan itu, secara khusus pada lembaran ini Penulis mengucapkan Salud dan Ribuan Terimakasih Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.SI. Yang menyediakan Fasilitas dan Memberikan Kesempatan kepada Penulis dalam Menimba Ilmu pada Lembaga Pendidikan yang Beliau Pimpin
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan Jajaran Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan Ilmu Pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.

4. Bapak Dr. H Rahyunir Rauf, M.Si, selaku Pembimbing I saya, yang telah banyak sekali memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan penelitian ini
5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP M,Si selaku Pembimbing II yang telah Meluangkan waktu dan berusaha semaksimal mungkin dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan benar hingga layak diseminarkan
6. Seluruh Staff/ Pegawai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan kepada Penulis dalam mengurus berbagai keperluan Adminitrasi yang berkaitan dengan Perkuliahan.
7. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/ Asisten Dosen Yang Telah Banyak memberikan ilmu kepada Penulis di saat sedang menjalankan Aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam Penyusunan Penelitian.
8. Pemerintah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atas kemudahan yang telah diberikan kepada Penulis selama melakukan Pengumpulan Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Terimakasih Kepada Kelurahan Gajah Sakti Yang telah memberikan Kemudahan kepada Penulis untuk melakukan Pengumpulan data yang dibutuhkan.
10. Persembahan ini diberikan terutama untuk kedua Orangtua, Ibuku Zulkaida Dan Ayahku Alberi yang telah bekerja keras, berdoa dan

memberikan dorongan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya dari apapun.

11. Terimakasih Kepada Senior Senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, Yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam proses penulisan karya ilmiah ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT.

12. Mahasiswa/I Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas F Angkatan 2015 Terutama Untuk Muhammad Riomadi S.IP, Ramadhani, Ramadhani Ikhasan, Rio Andika Saputra, Dan MHD Raziq yang selalu ada baik dalam suka maupun Duka.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulis ini dimasa yang akan datang. Semoga segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal alamin...

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penulis
Ttd

Miftah Surgana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Pemerintah	16
2. Konsep Pemerintahan.....	18
3. Konsep Kebijakan	21
4. Konsep Implementasi Kebijakan	24
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pikiran.....	32
D. Konsep Operasional	33
E. Operasional Variabel.....	36
F. Teknik Pengukuran	37
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi Dan sampel	41

D. Teknik Penarikan Sampel	42
E. Jenis Dan Sumber data.....	43
F. Teknik Pengumpulan data	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Jadwal Kegiatan	45
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	46

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkulu	48
1. Keadaan Geografis Kabupaten Bengkulu.....	48
2. Keadaan Penduduk Kabupaten Bengkulu	49
B. Gambaran Umum Kecamatan Mandau.....	50
1. Keadaan Geografis dan Demografis Kecamatan Mandau	50
2. Perekonomian Kecamatan Mandau.....	51
C. Gambaran Umum Kelurahan Gajah Sakti.....	52
1. Sejarah Dan keadaan Geografis Kelurahan Gajah Sakti.....	52
2. Keadaan Penduduk Kelurahan Gajah Sakti	52
3. Mata Pencaharian	53
4. Agama Dan Kepercayaan	53
5. Tingkat Pendidikan	54
6. Struktur Organisasi Kelurahan Gajah Sakti	55

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	56
1. Tingkat Pendidikan	56
2. Jenis Kelamin	57
3. Tingkat Umur	58
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Tamu wajib lapor 1 x 24 Jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti.....	58
1. Komunikasi	59
2. Sumber Daya.....	62

3. Disposisi.....	65
4. Struktur Birokrasi	68
C. Faktor – factor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupen Bengkalis No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti).....	73
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Kecamatan Yang ada di Kabupaten Bengkalis.....	4
I.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Mandau Pada Tahun 2011-2017	6
I.3 Jumlah Kelurahan Beserta Nama Lurah yang ada di kecamatan Mandau	7
I.4 Daftar Nama Nama Penduduk Yang Tidak Mendaftarkan dirinya 1x 24Jam di yang ada di Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandu Serta jumlah pelanggaran yang terjadi	13
II.1 Penelitian Terdahulu.....	30
II.2 Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah KabupatenBengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum	36
III.1 Populasi Dan Sampel Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.....	42
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah KabupatenBengkalis No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.....	45
IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di kelurahan Gajah Sakti....	52
IV.2 Jenis dan Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Gajah Sakti.....	53
IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Penganut agama yang ada di kelurahan Gajah Sakti	54
IV.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Gajah Sakti.....	54
V.1 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
V.2 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	57
V.3 Distribusi Responden Menurut Umur.....	58
V.4 Distribusi Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Komunikasi	59

V.5	Distribusi Penilaian Terhadap Jawaban Responden Masyarakat Tentang Komunikasi.....	61
V.6	Distribusi Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Tentang Indikator Sumber Daya	63
V.7	Distribusi Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Masyarakat) Tentang Indikator Sumber Daya	64
V.8	Distribusi Penilaian Terhadap Jawaban Respon (Aparat Pemerintah) Tentang Indikator Disposisi	66
V.9	Distribusi Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Masyarakat) Tentang Indikator Disoisisi	67
V.10	Distribusi Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Tentang Indikator Struktur Birokrasi	68
V.11	Distribusi Penilaian terhadap Jawaban Responden (Masyarakat) Tentang Indikator Struktur Birokrasi	69
V.12	Rekapitulasi Jawaban Aparat Pemerintah Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Tamu wajib lapor 1 x 24 jam di kecamatan amandau akelurahan Gajah Sakti).....	71
V.13	Rekapitulasi Jawaban Masyarakat Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Tamu wajib lapor 1 x 24 jam Di kecamatan Manfdau Kelurahan Gajah Sakti).....	72
V.14	Rekapitulasi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) dan (Masyarakat) mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengklais No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (studi tamu wajib lapor 1 x 24 jam di kecamatan Mandau Kelurahan Gajah asakti)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Fikir Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum	32
IV.1 Struktur Organisasi Kelurahan Gajah Sakti	55



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Qusioner Penelitian	79
Lampiran 2 : Wawancara Penelitian	98
Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	104
Lampiran 4 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	105
Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkalis	106
Lampiran 6 : Surat Pegantar Dari Kecamatan Mandau Untuk Melaksanakan Penelitian Di Satpoll PP Kecamatan Mandau dan Kelurahan Gajah Sakti	107
Lampiran 7 : Surat Keterangan Dari Kecamatan Mandau Bahwa Telah Melakukan Penelitian Di Satpol PP Mandau.....	108
Lampiran 8 : Surat Keterangan Dari Kelurahan Gajah Sakti BahwaTelah Melakukan Penelitian	109
Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian.....	110

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam
Riau Peserta Ujian Skripsi Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftah Surgana
NPM : 157310500
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 Tentang
Ketertiban umum (Studi Tamu wajib lapor 1x24
jam di kecamatan Mandau Kelurahan Gajah
Sakti)

Atas Naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah kaidah dan metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas
3. Bahwa, Apabila kemudian hari ditentukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan universitas serta hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga .Pekanbaru,

Pelaku Pernyataan

Miftah
Surgana

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM
(STUDI TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM DI KECAMATAN MANDAU
KELURAHAN GAJAH SAKTI)**

ABSTRAK

Miftah Surgana

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Peran Serta Masyarakat, Dan Tamu Wajib
Lapor 1 x 24 Jam

Tujuan Penelitian ini untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terkait Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti. Adapun Metode yang Digunakan yaitu Metode Kuantitatif dengan Teknik Analisis Deskriptif, Penulisan ini menggambarkan kondisi secara objek yang ditemukan di lapangan berdasarkan data data yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan Ketertiban Umum di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti. Dengan Kuisioner Dan Wawancara Sebagai Alat Pengumpulan Data, Dan data yang dikumpulkan kemudian disajikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi Empiris dan Objektifitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat 5 kelompok Populasi dan Sampel. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan Terdiri dari Data Primer Yang mana Diperoleh melalui alat penelitian berupa kuisioner, dan Daftar Wawancara, Serta Data Sekunder Yang Diperoleh dengan alat bantu tabel frekuensi sesuai hasil pengamatan yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Penelitian ini Masih Terlaksana Kurang Baik / Kurang Terimplementasi, dimana Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Menaati Aturan Yang telah dibuat oleh Pemerintah.

**IMPLEMENTASI OF DISTRICT REGULATION NO.1 IN 2016
CONCERNING PUBLIC ORDER**

**(STUDY GURSTS REPORT 1 X 24 HOURS IN MANDAU
SUB-DISTRICT KELURAHAN GAJAH SAKTI)**

ABSTRACT

Miftah Surgana

Keywords: Implementation, Policy, community participation, and Guests must report 1 x 24 Hours.

The purpose of this study is to describe the implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Public Order concerning Mandatory Report 1 x 24 hours in Mandau Subdistrict, Gajah Sakti Village. The Method Used is a Quantitative Method with Descriptive Analysis Technique, this writing describes the conditions in the objects found in the field based on data data relating to the problems of the implementation of Public Order in Mandau Subdistrict, Gajah Sakti Village. With Questionnaires and Interviews as a Data Collection Tool, and the data collected is then presented as the main raw material for analyzing the Empirical condition and objectivity of the existence and purpose of the study at the location under study. There are 5 groups of population and samples. Types and data collection techniques used consist of primary data which is obtained through research tools in the form of questionnaires, and interview lists, as well as secondary data obtained by means of frequency tables according to the results of observations that the authors make then conclude that the implementation of this research is still implemented Poor / Poorly Implemented, where there is still a lack of public awareness in complying with the rules made by the government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan Tujuan Negaranya Yaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia Yang melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial. Dalam mencapai Tujuan nya dibentuklah suatu Pemerintah. Pemerintah adalah Lembaga Kekuasaan Negara. maka Pemerintah itu Terdiri atas berbagai tingkatan, yaitu dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintah Daerah Untuk Mengatur Dan Mengurus Urusan Pemerintah Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.

Hal ini sama dengan isi Pasal 18 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Berbunyi “Wilayah Provinsi Dibagi Atas Kabupaten Dan Kota, yang tiap tiap Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Itu Mempunyai Pemerintahan Daerah, Yang Diatur Dengan Undang Undang”. Agar masing masing satuan Pemerintah tersebut dapat melaksanakan Tugas, Fungsi, Wewenang Serta Tanggung Jawabnya, Maka dalam menetapkan kebijaka suatu pengelolaan pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Hal sejalan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (3) Pemerintah Daerah adalah Pelaksana urusan Pemerintahan Oleh Pemerintahan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut Ryas Rasyid (dalam Maulidiah, 2014;4), Fungsi Pemerintahan Dapat dibagi atas Beberapa Fungsi, Adapun Fungsi Fungsi tersebut adalah :

- A. Fungsi Pelayanan (Service)
- B. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment)
- C. Fungsi Pembangunan (Development)

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Pemerintah Daerah, pembagian urusan Pemerintahan Terbagi atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Dan Urusan Pemerintahan Umum. Dimana Dalam Penelitian ini penulis Berfokus Pada Urusan Pemerintahan umum yang berkaitan dengan pelayanan Dasar yaitu Terkait Dengan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pada Hakikatnya Pemerintah Dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat, yaitu Kebutuhan untuk merasa Aman, hal ini sesuai dengan Teori Terbentuknya Negara yaitu, Negara berfungsi sebagai Penjaga Malam dimana sebagai Masyarakat bertugas menjaga, sebagian besar Masyarakat lainnya tidur pada Malam hari sehingga Masyarakat terpenuhi kebutuhan akan rasa Aman, Rasa Tertib dan rasa Tenram. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Fungsi Dasar dari suatu Pemerintahan yakni Pelayanan, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk

Pelayanan kepada masyarakat atau Publik. Baik Pelayanan Pemerintah, Pelayanan Pembangunan, Pelayanan Kemasyarakatan dan Pelayanan Pemberdayaan.

Menurut Werella (dalam Maulidiah, 2014 :9), Pelayanan adalah merupakan suatu bentuk dari Perbuatan, suatu Kinerja tau suatu bentuk usaha yang menunjukkan pentingnya penerimaan jasa pelayanan yang terlibat secara aktif di dalam suatu produksi atau suatu penyediaan proses pelayanan itu sendiri dari institusi Pemerintah Kepada Masyarakat.

Sedangkan Pelayanan Publik menurut Tjosvold dalam Wasistiono (2003; 317) adalah Proses melayani Masyarakat baik sebagai suatu kewajiban, maupun sebagai suatu Kehormatan, merupakan suatu dasar bagi terbentuknya suatu masyarakat manusiawi.

Dalam suatu proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada suatu Negara unsur yang dilayani adalah unsur Publik atau masyarakat, baik publik yang bersifat Internal (unsur Pemerintah) maupun Publik Eksternal (Masyarakat), oleh karena itu dapat diketahui bahwa Pelayanan Publik tidak lain adalah Proses Pemenuhan kebutuhan dari masyarakat secara umum. baik masyarakat internal maupun masyarakat eksternal oleh Lembaga Lembaga Birokrasi Pemerintahan, khususnya dalam proses pemenuhan dasar dari masyarakat seperti kebutuhan akan rasa aman, rasa tertib, kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan bidang pendidikan serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya, yang bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Berbicara mengenai Pelayanan salah satu Aspek yang tidak mungkin bisa di pungkiri ialah perilaku penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan

Pelayanan Publik adalah setiap Institusi Penyelenggara Negara, Koorporasi, Lembaga Independen, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan Badan Hukum lainnya yang dibentuk hanya untuk Pelayanan Publik.

Berdasarkan Pelaksanaan otonomi, Daerah Kabupaten Bengkalis mendapat kewenangan menjalankan Fungsi Pemerintahan dalam bentuk pelayanan Publik, Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. dengan luas adalah 7.793,93 km². secara Administrasi Pemerintahan, terbagi atas 8 Kecamatan, tercatat Jumlah Penduduknya adalah 498.335 jiwa, Keseluruhan penduduknya penganut agama islam. Dan Kabupaten Bengkalis terdiri atas 11 Kecamatan.

Tabel I.1 Kecamatan Yang Ada Di Kabupaten Bengkalis.

No	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Kecamatan
1	Bantan	Selat Baru	420,40 Km ²
2	Bengkalis	Bengkalis	514,00 Km ²
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1.128,00 Km ²
4	Mandau	Duri	937,47 Km ²
5	Rupat	Batu Panjang	1.524,85 Km ²
6	Rupat Utara	Tanjung Medang	628,50 Km ²
7	Pinggir	Pinggir	2.503,00 Km ²
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	742,21 Km ²
9	Batin Solapan	Sebangar	-
10	Bandar laksamana	Tenggayun	-
11	Talang Muandau	Beringin	-

Sumber : Kantor Camat Mandau

Pada saat ini Penulis Memfokuskan Penelitian di Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau, yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di

Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau Ber Ibu Kotakan Duri, yang berada di Lajur jalan Raya lintas Sumatra , Sekitar 120 Km dari Ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru. Mandau adalah Daerah yang memiliki Pertumbuhan Penduduk yang Cukup Pesat. Tingginya tingkat perpindahan penduduk yang dipengaruhi banyaknya perusahaan Migas menjadi penarik tersendiri bagi sebagian orang untuk tinggal dan mencari nafkah di Daerah ini, alasannya adalah karena Daerah tersebut merupakan penghasil minyak dengan kualitas minyak terbaik di dunia, Ladang Minyaknya telah di eksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Bersama Minas dan Dumai , Duri menyumbang sekitar 60% Produksi minyak mentah Indonesia dengan rata rata produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari. Munculnya perusahaan perusahaan ini, dilatar belakangi oleh kekayaan sumber daya minyak bumi yang terkandung di dalamnya.

Selain kaya dengan Minyak bumi, Sektor industri juga memegang peran penting dalam Kehidupan masyarakatnya, Terdapat dua industri besar dan lima industry Aktif di wilayah ini, selain industri, Berdagang Termasuk salah satu penunjang perekonomian di Kecamatan Mandau. Selain itu juga memiliki sarana peragangan dan akomodasi yang terbilang dalam jumlah yang relatif banyak, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa duri menjadi daerah yang paling padat penduduk di antara daerah lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Tabel I.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Mandau Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah penduduk		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
2011	114.671	106.973	221.644
2012	118.205	110.412	228.617
2013	112.271	112.271	232.391
2014	121.974	114.058	236.032
2015	123.665	115.848	239.513
2016	125.491	117.436	242.927
2017	198.367	191.510	389.877

Sumber : Uptd Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk yang ada di Kecamatan Mandau peningkatannya sangat pesat, Seiring dengan Pertumbuhan Penduduk yang semakin Tinggi Maka Penciptaan Ketertiban Umum menjadi Hal yang sangat penting yang harus dijaga serta dipelihara oleh Pemerintah Kecamatan Mandau, kerana dengan adanya penciptaan kehidupan yang Harmonis maka akan terciptanya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Lingkungan Masyarakat.

Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri atas Sembilan Kelurahan, Pada saat ini yang menjadi focus penelitian adalah kelurahan gajah sakti, Kelurahan gajah sakti adalah satu dari Delapan Kelurahan yang memiliki jumlah Penduduk yang banyak, Adapun Nama Nama Kelurahan yang telah ditetapkan di Kecmatan Mandau adalah Sebagai Berikut:

Tabel I.3 Jumlah Kelurahan Dan Nama Lurah yang ada di kecamatan Mandau.

Nama kelurahan	Nama Lurah
Lurah Air Jamban	Hj Aida
Lurah Babussalam	Zulfikar Yazid, SE
Lurah Balik Alam	Zainab, A.KS
Lurah Batang Serosa	Syafrimal
Lurah Duri Barat	Risnawati
Lurah Duri Timur	Andri Hamzah, SE
Lurah Gajah Sakti	Rasmini
Lurah Pematang Pudu	Muhammad Rusydy
Lurah Talang Mandi	Adik Suwito,ST

Sumber : Uptd Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Man

Yang menjadi Alasan Penulis Melakukan Penelitian di Kelurahan Gajah sakti Dikarenakan Kelurahan Gajah sakti merupakan kelurahan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan delapan kelurahan lainnya yang ada di kecamatan Mandau, Kelurahan Gajah sakti memiliki Penduduk sebanyak 14.732 penduduk, dengan RT Sebanyak 51 Dan RW 11.

Untuk menciptakan Keamanan dan Ketertiban Umum maka Pemerintah Daerah Babupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.yang memuat tentang permasalahan penciptaan ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang Undangan Yang Di Bentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah. Di Kabupaten Bengkalis Terdapat Peraturan Daerah. Setiap daerah pasti memiliki peraturan, seperti halnya Kabupaten Bengkalis memiliki Peraturan Daerah yaitu

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Ketertiban adalah Suatu Keadaan dimana segala Kegiatan dapat Berfungsi dan berperan sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Ketertiban memiliki korelasi yang sangat erat dengan keamanan dimana keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya Keamanan, Ketertiban dan tegaknya Hukum Serta Terbinanya Ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan Masyarakat dalam menangkal, Mencegah dan Menanggulangi segala bentuk bentuk Pelanggaran Hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Ketertiban Umum Merupakan Suatu Asas Yang Dibuat Oleh Badan Eksekutif Suatu Dasar Atau Ketentuan Penting Bagi Suatu Negara Dan Semua Masyarakat. Maka Dari Itu Dibentuklah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yang Bertugas Untuk Menagani Masalah Ketertiban Umum. Dimana Satpol PP Bahwa mempunyai Tugas menegakkan Peraturan Daerah Dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Arti penting Ketertiban Umum ialah untuk menciptakan Suatu Kehidupan yang Teratur, Tertib dan Tenram tidak Terjadinya Gangguan dan Ancaman pada suatu Daerah sehingga Daerah menjadi Teratur, Tertib, dan Tenram sehingga Masyarakat yang ada di Daerah tersebut dapat beraktivitas dengan Nyaman dan teratur sesuai dengan aturan yang dan akhirnya bisa menciptakan kelancaran

dalam pelaksanaan Aktifitas sehari-hari. dengan adanya Rasa Teratur, Tertib dan Tenram Masyarakat merasa nyaman maka timbul lah masyarakat yang patuh akan Hukum dengan segala aturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap Tertib terhadap sesuatu dimana saling menjunjung tinggi aturan yang ada, saling mengerti keadaan masing-masing, sehingga masyarakat dapat merasa bahwa dalam kondisi yang di hadapi masyarakat dapat merasa Tenram dan Tertib secara Jasmani dan Rohani, Bahagia dan tenang tanpa adanya Rintangan dan gangguan apapun, dan itulah yang disebut terciptanya suasana tertib, Teratur, Dan Tenram. Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Atau Regulasi.

Berkaitan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum yang berkaitan dengan Pasal 55 berbunyi :

- (1) Setiap Orang Yang Berkunjung Atau Lama Bertamu Lebih Dari 1 X 24 Jam (Satu Kali Dua Puluh Empat) Jam Wajib Melaporkan Dirinya Kepada Rukun Tetangga Setempat
- (2) Setiap Pemilik Rumah Kost Dan/Atau Penghuni Rumah Kontrakan Wajib Melaporkan Penghuninya Kepada Kades/Lurah Melalui Pengurus Rukun Tetangga Setempat Secara Periodik.
- (3) Setiap Penghuni Kontrak Wajib Melapor Kepada Kades/Lurah Melalui Pengurus Rukun Tetangga Setempat Secara Periodik.
- (4) Setiap Pengelola Rumah Susun Dan Apartemen Wajib Melaporkan Penghuninya Kepada Kades/Lurah Melalui Pengurus Rukun Tetangga Setempat Secara Periodik.

Yang menjadi fokus saya dalam Peraturan Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban umum ini adalah pada pasal 55 ayat (1), (2), dan (3), disitu dijelaskan bahwasanya setiap tamu yang berkunjung, bertamu lebih dari 1 x 24 jam dan warga yang datang untuk mengontrak ataupun ngekost wajib melaporkan

dirinya kepada RT/RW setempat, Gunanya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pelanggaran yang akan meresahkan warga setempat, Hal ini sesuai dengan Fenomena yang saya angkat

Terkait mengenai pelaporan dan pendataan warga yang bertamu yang wajib melaporkan dirinya kepada RT Setempat adalah pemilik rumah, melalui penyerahan Kartu tanda penduduk, dan bagi mereka yang mengeontak ataupun ngekost wajib melaporkan dirinya melalui pemilik rumah Kontrak ndan Rumah Kost tersebut.

Dari sekian banyak peraturan daerah Kabupaten Bengkalis yang ada. Penulis memilih Peraturan Bengkalis ini, karena Peraturan Daerah ini merupakan Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis yang terbaru dan pada peraturan ini terdapat pasal yang menjelaskan mengenai permasalahan yang penulis angkat, yaitu mengenai peran serta masyarakat dalam peningkatan program tamu wajib lapor 1 x 24 jam yang dijelaskan pada Pasal 55.

Setiap adanya Peraturan yang ditetapkan pasti adanya Sebuah Sanksi, Sanksi yang Diberikan Terhadap Masyarakat yang melanggar Aturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 ini Adalah berupa Ketentuan Pidana yang terletak pada Pasal 59. Sanksi Tersebut berupa ancaman Pidana Kurungan Paling Lama 90 hari, dan yang paling sebentar adalah 6 hari, Dan atau Denda Sesuai dengan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan.

Aturan mengenai Tamu Wajib lapor 1 x 24 jam yang berada pada Pasal 55 tersebut ternyata berhubungan erat dengan Pedoman Penataan Lembaga

Kemasyarakatan (Permendagri). perlu dipahami juga bahwa rukun tetangga (RT) Merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah warga setempat. dalam Permendagri tersebut tercantum bahwa RT/RW, memiliki fungsi:

1. Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya
2. Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan Hidup antar warga;
3. Pembuatan Gagasan dalam Pelaksanaan Pembangunan dengan mengembangkan Aspirasi dan Swadaya murni masyarakat ; dan
4. Penggerak Swadaya Gotong Royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

Dari ke Empat fungsi diatas, Berhubungan dengan Aturan Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam berkaitan dengan fungsi RT dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga Negara. dengan kata lain pemberlakuan aturan tamu wajib lapor dalam rangka pemeliharaan dan menciptakan lingkungan yang aman. dengan cara melaksanakan Sosialisasi antar RT yang ada di keluarahan Gajah sakti serta membuat spanduk di setiap gang terkait Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam.

Aturan Tamu Wajib Lapor ditetapkan karena dalam setiap daerah ada yang memimpin dan Berkewajiban untuk mempertahankan keamanan, keselamatan yang harus diberitahu ketika ada orang yang datang, sehingga tidak ada seorang pun yang ceroboh untuk datang atau membawa orang lain ketempat / suatu daerah tanpa memberi tahu (RT), Aturan ini diterapkan dengan Efektif pada masa Presiden Soeharto dengan RT/RW Sebagai Pihak yang mendapat kehormatan untuk menerima laporan dari warga yang datang ke kampung melebihi batas yang telah ditetapkan.

Aturan tamu wajib lapor 1 x 24 jam kepada ketua RT ini merupakan upaya pencegahan kejahatan yang diupayakan oleh RT di wilayahnya untuk membuat

lingkungan masyarakat kondusif dari kejahatan kejahatan lainnya. caranya masyarakat harus guyub rukun dan kembali mengaktifkan siskamling. RT juga harus membuat wajib lapor bagi pendatang atau tamu yang bermalam 1 x 24 jam. Siskamling dan Wajib Lapor 1 x 24 Jam ini mempunyai banyak manfaat untuk mengantisipasi sejak dini terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Salah satu manfaatnya adalah untuk mencegah kejahatan kejahatan seperti Terorisme, tindak Asusila dan Perampokan.

Dengan adanya tingkat kejahatan yang semakin tinggi, aturan ini harus diterapkan di berbagai Daerah. penerapan ini tentunya disertai dengan masuknya aturan tersebut dalam Peraturan Daerah setempat. meskipun sudah diterapkan di berbagai daerah melalui sebuah peraturan, ternyata wajib lapor 1 x 24 jam ini masih dianggap seperti angin lalu, karena masih banyak yang tidak patuh akan aturan yang telah dibuat. Seharusnya adanya aturan ini dapat membuat lingkungan menjadi lebih aman dan tertib, tetapi pada kenyataannya aturan ini tidak berjalan dengan baik karena Kesadaran masyarakat yang sangat rendah terhadap aturan wajib Lapor yang dianggap kurang penting dan menganggap hal ini sepele, Sedangkan aturan itu telah ditetapkan agar dapat dipatuhi oleh masyarakat, dan telah ditetapkan juga sanksi yang setimpal bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut, tetapi kenyataannya kesadaran untuk menciptakan ketertiban tersebut sangat rendah serta tidak adanya dukungan dari setiap elemen, baik itu masyarakat maupun pejabat setempat yang bersangkutan.

Tulisan Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam banyak sekali ditemui pada Pos Ronda, dan di Rumah ketua RT, RT/RW selalu Menjalankan Tugas wajib salah satunya

adalah mencatat Penduduk yang datang untuk bertamu ataupun menetap di daerah tersebut, Perpindahan dan Pertumbuhan Penduduk menjadi penghalang bagi pelaksanaan Ketertiban umum yang berkaitan dengan Aturan Tamu wajib 1 x 24 ini. Berikut adalah Tabel Data penduduk Kecamatan Mandau Yang Tidak Mendaftarkan Dirinya kepada Rt/Rw Setempat.

Tabel I.4 : Daftar penduduk yang tidak mendaftarkan dirinya 1 x 24 jam dan Jumlah pelanggaran Yang Terjadi.

No	RT/RW	Jumlah Kk Terdaftar	Jumlah Penduduk Per Rt	Jumlah Warga Yang Tidak Mendaftar	Jumlah Pelanggaran
1	RT 01/RW 01	60 KK	280 Orang	2 KK	2 Masalah
2	RT 02/RW 01	66 KK	320 Orang	4 KK	2 Masalah
3	RT 03/RW 01	80 KK	255 Orang	4 KK	3 Masalah
4	RT 01/ RW 02	60 KK	350 Orang	Terdaftar	-
5	RT 02/ RW 02	46 KK	280 Orang	2 KK	2 Masalah
6	RT 03/RW 02	84 KK	335 Orang	3 KK	2 Masalah
7	RT 01/RW 03	48 KK	192 Orang	Terdaftar	-
8	RT 02/RW 03	52 KK	260 Orang	3 KK	1 Masalah
9	RT 03/RW 03	87 KK	240 Orang	2 KK	1 Masalah
10	RT 01/RW 04	53 KK	212 Orang	4 KK	3 Masalah
11	RT 02/RW 04	79 KK	395 Orang	6 KK	4 Masalah
12	RT 01/RW 05	40 KK	200 Orang	2 KK	-
13	RT 01/ RW 06	120 KK	600 Orang	5 KK	4 Masalah

Sumber : KK masyarakat yang telah terkumpul

Melihat keadaan yang ada, masing masing RT memiliki warga yang tidak melaporkan dirinya kepada ketua RT setempat, dikarenakan kurangnya kesadaran

dari masyarakat tersebut, dan masyarakat beranggapan mereka yang datang dengan jangka waktu yang tidak lama tidak perlu melaporkan dirinya kepada ketua RT, Oleh Karena Itu Dapat Dikatakan Bahwa ketertiban yang ada di kota duri kecamatan Mandau tidak berjalan dengan maksimal. Maka RT dan RW telah berupaya meningkatkan pelaksanaan tamu wajib lapor 1 x 24 jam terhadap masyarakat, tetapi belum optimal dilaksanakan. Permasalahan ini bisa dilihat pada fenomena yang terjadi sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum, bahwa RT/RW setempat kurang teliti untuk mendata warganya sehingga banyak warga yang datang untuk bertempat tinggal disana tidak melapor 1 x 24 jam.
2. Adanya warga yang Mengontrak/ ngekost tetapi tidak langsung melaporkan dirinya kepada RT/RW, sehingga banyak nya terjadi pelanggaran pelanggaran yang meresahkan warga setempat.

Berdasarkan fenomena yang ada maka ingin meneliti lebih luas lagi tentang ketertiban umum yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum .**

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan aturan Pendataan Masyarakat yang bertamu 1 x 24 jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti Kurang berjalan dengan maksimal sesuai yang diharapkan, Maka penulis merumuskan Permasalahan

Yaitu : **“Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Terkait Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam Bisa berjalan dengan Maksimal?”**

C. Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat Memahami implementasi peraturan daerah kabupaten bengkalis no 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Studi Kasus Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam di Kecamatan Mandau.
- b. Untuk mengetahui Faktor factor penghambat Pelaksanaan Aturan Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam Di Kelurahan Gajah Sakti.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengingatkan harus melakukan Wajib Lapor apabila bertempat tinggal di suatu Daerah
- b. Sebagai Petunjuk dan Pembeda bagi penulis lainnya yang berkeinginan meneliti masalah ini lebih lanjut tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.
- c. Untuk peneliti sebagai salah satu syarat tugas akhir perkuliahan serta menambah ilmu.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum” Maka penulis akan menggunakan beberapa konsep teoritis yang menurut penulis erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, adapun di dalam menggunakan konsep teoritis tersebut adalah sebagai kerangka pemikiran yang akan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut, antara lain :

1. Konsep Pemerintah

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memecahkan permasalahan, maka diperlukan Teori atau pengertian dari pemerintah dan pemerintahan agar mempermudah untuk memperoleh hasil yang objektif, untuk itu Penulis mengemukakan pendapat mengenai pengertian pemerintah dan pemerintahan itu sendiri.

Menurut Ndraha (2011;6) Pemerintah adalah badan yang berkewajiban memproses pelayanan publik dan pelayanan civil bagi semua orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat yang bersangkutan dapat menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan keinginan yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga Negara asing atau siapa saja Yang ada secara

sah di Wilayah Indonesia, berhak menerima layanan Civil tertentu, dan Pemerintah Harus melayaninya.

Pendapat Awang dan Wijaya (2012;6) Kata Pemerintah dan Pemerintahan mengandung perbedaan. Pemerintahan Beraitan dengan Tugas dan Kewenangan, S Pemerintah Menyangkut Aparat yang Pelaksana Tugas dan kewenangan tersebut. Tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat Statis sedangkan tugas bersifat Dinamis.

Sementara itu menurut Mustafa (2014;87-88) kata Pemerintah dapat diartikan dalam Arti Sempit dan Arti Luas. dalam arti Sempit yaitu : Terdiri Atas Satu Lembaga saja, Yaitu Eksekutif. Sedangkan dalam arti luas adalah semua lembaga yang ada Yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Auditif.

Lain Halnya dengan Alpeldoore (dalam supriyanto, 2009;22-23) "Pemerintah" sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian yang dicatat Utrecht sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai Kesatuan semua Lembaga Negara yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dalam arti luas. yang meliputi badan badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Yang disebut sebagai penguasa
2. Pemerintah sebagai Lembaga Negara tertinggi yang berkuasa memerintah di suatu Negara. dalam hal ini Presiden, Perdana Menteri, dan lain-lain
3. Pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif, dalam artian kepala Negara bersama-sama dengan Mentrinya.

2. Konsep Pemerintahan

Maulidiah (2014;1-2) secara umum Pemerintahan yaitu orang atau sekelompok orang yang diberikan Pernyataan yang sah oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas tugas Pemerintah, dan dilengkapi oleh alat alat kelengkapan Negara yang berperan membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas tugas Pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan Legitimasi dalam bentuk Kewenangan untuk menjalankan tugas tugas Pemerintah yang dalam arti ini adalah menyelenggarakan pelayanan Pemerintah, Pelayanan Pembangunan, Pelayanan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan sehingga Pemerintah memiliki Fungsi dasar yakni Pelayanan.

Pendapat Ridwan (2014;30-31) Pemerintahan yaitu urusan yang dilaksanakan Negara dalam mewujudkan Kesejahteraan masyarakat dan keperluan Negara. Sedangkan Pemerintah ialah badan/alat atau Aparat yang menjalankan Pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat di artikan secara luas dan dalam arti sempit . Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang cabang Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif atau alat alat Kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan dalam Pengertian sempit Pemerintah adalah Cabang Kekuasaan Eksekutif.

Pemerintahan adalah kumpulan orang orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu dalam mengordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan

masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri (Syafiie 2013;12)

C.F Strong (Syafiie 2011: 9) Pemerintahan memiliki wewenang untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karna itu harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, harus memiliki Kekuasaan Legislatif, dan terakhir harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi.

Bevir (Wasistiono dan Simangunsong, 2015;87) Posisi Pemerintahan ibarat kemudi kapal (istilah Yunani : kubernan), mendorong Bevir membagi pengertian pemerintahan kedalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (government as institution), sedangkan dalam arti luas Pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses (government as a process). Dalam konteks bahasa Indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau orang yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai proses atau aktivitas memerintah.

Syafiie (2007,57) Mengatakan bahwa teknik teknik pemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi
Yang Diperlukan pada Point Ini yaitu Pengaturan, Pembaharuan, Kepentingan Orang Banyak, Dan Tujuan Bersama.
2. Partisipasi
Keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pemerintahan.
3. Desentralisasi
Penyerahan Kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah.
4. Dekonsentrasi
Pelimpahan Kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah
5. Sentralisasi

Pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat, dalam hubungan pusat dan daerah, pada suatu sistem pemerintahan.

6. Integrasi

Usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat member keputusan kepada organisasi atau pemerintah pusat

7. Delegasi

Proses dimana otoritas seorang atasan diteruskan ke bawah kepada seorang bawahan

Asas-asas pemerintahan yang ada berlaku di Indonesia Ndraha (Dalam

Syafiie,2007;55) Mengatakan sebagai berikut :

1. Azas Aktif

sumber utamanya pembangunan, keahlian, dana, kewenangan, Organisasi dan lain lain. Di Negara Negara berkembang pemerintah senantiasa berada pada posisi sentral oleh karena itu pemerintah memegang peranan inovatif dan inventif. Bahkan pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, jadi pemerintah itu selalu aktif dimanapun berada.

2. Azas Vrij Bestuur

kekosongan pemerintahan.

3. Azas Freise Ermessen

Dalam hal ini pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru, sepanjang tidak ada bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ataupun norma kebiasaan suatu tempat.

4. Azas Historis

Azas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, apabila terjadi suatu peristiwa maka untuk menanggulangnya harus berpedoman kepada pemecahan peristiwa yang lalu.

5. Azas Etis

Azas yang dalam pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan Kaidah moral.

6. Azas Otomatis

Azas dengan sendirinya, yaitu bila ada suatu kegiatan baru yang diluar tanggung jawab suatu departemen atau non departemen , baik sifatnya rutin ataupun sewaktu waktu

7. Azas Detaurement de Pouvoir

Azas kesewenang wenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya,atau sebaliknya ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat, jadi azas ini merupakan pertentangan dari semua azas.

Sedangkan menurut Santos (dalam Iestari, 2004:21) Pemerintah Memiliki Tugas, yaitu :

a. Melakukan pembangunan

Masalah pembangunan sesungguhnya dibagi ke dalam dua bagian yaitu masalah objek dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya, selanjutnya adalah masalah subjek pembangunan yang pada hakikatnya menyangkut masalah Sosial, Politik, Pendidikan, dan Manajemen Pemerintahan.

b. Pemberdayaan masyarakat

Dalam hal ini Pemerintahan Desa sebagai Organisasi Pemerintahan yang menunjukkan tugas tugas Pemerintahan termasuk memelihara ketertiban dan keamanan untuk menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Adil dan makmur

c. Memberikan pelayanan public

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Pemerintahan sebagai Pelayan masyarakat, maka diperlukan adanya Aparatur yang mempunyai kemampuan proporsional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah Suatu Perkataan atau tulisan yang memberikan petunjuk tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batasan dan arahan umum kepada orang untuk melakukan sesuatu, Kebijakan adalah arti dari kata Policy. Kebijakan dapat juga berarti konsep dan asas yang menjadi awal pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakana berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati hati oleh pengambil keputusan dan bukan

kegiatan kegiatan yang berulang, rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan aturan keputusan.

Kebijakan Publik adalah suatu Keputusan yang dibuat oleh Negara ,terkhususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan (Nugroho,2008;55)

Dari hal tersebut kebijakan publik Terdiri atas 3 kelompok, (Nugroho,2008;62) :

- a. Kebijakan public Macro
- b. Kebijakan publik Messo
- c. Kebijakan Publik Mikro

Suharto (2005 : 7) mengatakan kebijakan Yaitu ketetapan yang membuat prinsip prinsip untuk mengarahkan cara cara bekerja yang disusun secara terencana serta konsisten dalam mencapai tujuan tertentu, sehingga setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan bis aberjalan secara efektif.

Friedrich (Wahab 2008;3) Kebijakan adalah suatu perilaku yang mengacu pada tujuan yang di tetapkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Andreson (Koryati (2005;7) mengemukakan bahwa Kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan instansi pemerintah dan Aparaturnya. sehingga dapat dikatakan bahwa :

- A. Kebijakan pemerintah harus ada tujuan tertentu, atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan

- B. Kebijakan itu berisi tindakan tindakan atau pola pola tindakan pejabat pemerintah
- C. Kebijakan yaitu perbuatan benar benar dilakukan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
- D. Kebijakan pemerintah dalam arti positif harus berpedoman pada peraturan perundang undangan dan bersifat memaksa (otoritatif) untuk memahami berbagai definisi kebijakan public beberapa konsep jitu

Nugroho Kebijakan Publik berkaitan dengan ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai cara untuk mencapaisuatu tujuan Negara. Dan strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang di cita citakan.

Pendapat Young dan Quinn dalam Edi Suharto Antara lain :

- A. Perilaku pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan di laksanakan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi dan financial untuk melakukan
- B. Sebuah reaksi terhadap kebutuhak, kebijkan publik berusaha menanggapi maslah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
- C. Semua tindakan yang berfokus pada tujuan, kebijakan public tidak hanya sebuah keputusan tunggal ,tetapi terdiri dari beberapa pilihan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan demi kepentingan orang banyak
- D. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan maslah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa maslaah sosial akan dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- E. Sebuah pembenaarn yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang actor, kebijakan publik berisi pernyataan atau membenaran terhadap rencana yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah di rumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga Pemerintah.

Dunn (2001;105) Perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna di dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecah suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penelitian yang diperoleh dari beberapa pendapat yang ada
3. Penetapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan /instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Pengorekisan terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

4. Konsep Implementasi Kebijakan

Dunn (2003:22) mengemukakan bahwa pembuatan kebijakan yaitu kumpulan kegiatan intelektual yang dilaksanakan dalam proses kegiatan yang pada awalnya bersifat politis, kegiatan politik itu dijelaskan sebagai sekumpulan tahap yang saling bergantung yang diatur menurut aturan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan adalah sebuah kegiatan yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dan aktivitas fisik dan eksresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternative dalam arah yang dikehendaki.

George C. Edwards III (Sujianto.2008:15) dalam menetapkan suatu Implementasi Kebijakan, sebaiknya harus berfokus pada suatu ketetapan yang untuk itu perlu dipertimbangkan, ada 4 faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu :

1. Komunikasi
Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. melalui komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan
2. Sumber Daya
Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu

dirumuskan ditentukan dengan sikap masing masing pelaksana kebijakan,apabila pelaksana kebijakan berlaku baik,maka kebijakan akan terlaksan dengan baik,begitupun sebaliknya,

3. Sikap (Disposisi)

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel berat pada implementor kebijakan atau program, karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.adil,dan dermawan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legislative dan eksekutif ,kekuasaan organisasi,derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Menurut Rian Nugroho (2005;158) Pelaksana Kebijakan pada Prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melebihi formulasi kebijakan.

Menurut Sumaryadi (2013;87) implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan dalam rangka menciptakan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi badan pelaksana melalui proses adminitrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan dalam praktiknya merupakan sebuah proses. Berkaitan dengan proses implementasi kebijakan, Wahab (Dalam Sumaryadi, 2013,88) menyebutkan unsur penting dalam Proses Implementasi yaitu :

- a. Adanya kebijakan yang dilakukan.
- b. Target Grub, Yaitu Kelompok masyarakat yang diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan atau peningkatan

- c. Unsur Pelaksana, Organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Ripley dan Franklin dalam Budi winarno (2012;45) implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang undang di tetapkan yang memberi Kekuasaan terhadap program, kebijakan,keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Grindle dalam (Budi Winarno,2012:149) memandang bahwa implementasi secara umum , tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan tujuan Kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan Pemerintah.

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya Implementasi kebijakan dapat menjadi penentu keberhasilan suatu proses kebijakan sehingga tujuan dan dampak dari suatu kebijakan dapat dihasilkan.

Menurut Gordon (2008:58) menyebutkan bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan ditetapkan dengan indicator sebagai berikut :

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah aktivitas Aparatur birokrasi dalam mengorganisasikan atau mengelola segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang meliputi kebutuhan manusia, sarana dan prasarana, unit pelaksana tugas dan metode pelaksanaan program.

2. Interpretasi

Interpretasi adalah suatu aktivitas Aparatur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu mewujudkan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dalam bentuk pengaturan atau penatalaksanaan secara teknis dalam keadaan nyata.

3. Penerapan

Penerapan adalah suatu aktivitas Aparatur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu dengan mewujudkan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dalam bentuk program atau kegiatan.

Menurut Nugroho (2008;445) keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

- 1) Dilihat dari proses dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (Design) yang merujuk pada kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai, dimensi ini diukur dengan melihat dua factor, yaitu :
 - a. Baik buruknya pada masyarakat secara individu
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Pelaksanaan Kebijakan dalam kajian Manajemen yaitu Organizing, Leading, Controlling, jadi Ketika Kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan pelaksanaan dan melakukan

pengendalian pelaksanaan tersebut . secara rinci kegiatan dalam manajemen

Implementasi Kebijakan dapat di susun sebagai berikut; Nugroho (2005;24)

1. Tahap Implementasi Strategi.
 - A. Penyesuaian Struktur dengan strategi
Yaitu adanya kesesuaian antara pengambil keputusan dengan rencana kebijakan.
 - B. Melembagakan strategi.
Yaitu adanya suatu strategi suatu organisasi atau lembaga yang menjalankan setiap kebijakan tersebut.
 - C. Mengeperasikan strategi
Yaitu menjelaskan setiap rencana awal kebijakan untuk menjelaskan
 - D. Memakai prosedur untuk memudahkan implementasi
Yaitu adanya prosedur yang jelas guna memudahkan pelaksanaan kebijakan
2. Pengorganisasian (Organizing)
 - A. Kelurahan organisasi dan struktur organisasi
Yaitu adanya suatu bentuk organisasi guna menjalankan kebijakan yang ada
 - B. Pembagian pekerjaan dan kelurahan pekerjaan
Yaitu jelasnya pembagian kerja dari pihak betuk organisasi dalam pelaksanaan kebijakan
 - C. Interaksi dan koordinasi
Yaitu adanya hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan suatu kebijakan
 - D. Pemilihan dan penempatan sumber daya manusia
Yaitu menarik sumber daya manusia dan menempatkannya pada tempat yang tepat.
3. Pergerakan dan kepemimpinan
 - A. Efektifitas Kepemimpinan
Yaitu kemampuan pemimpin dalam menjalankan suatu organisasi
 - B. Motivasi
Yaitu adanya dorongan dari pemimpin pada bawahan bekerja dengan lebih baik
 - C. Etika
Yaitu Sikap yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja
 - D. Mutu
Yaitu Kualitas yang di miliki oleh organisasi
 - E. Kerjasama tim
Yaitu adanya kekompakan pegawai dalam organisasi untuk melakukan suatu kerjaan
 - F. Komunikasi organisasi
Yaitu komunikasi secara internal antar setiap pegawai serta dengan pemimpin
 - G. Negosiasi
Yaitu adanya kegiatan saling tukar pikiran satu orang dengan orang lain.

4. Pengendalian

A. Kelurahan pengendalian

Yaitu melakukan penggambaran mengenai setiap kegiatan di dalam organisasi

B. System informasi manajemen

Yaitu melakukan manajemen system yang baik untuk mendukung pekerjaan

C. Pengendalian anggaran atau keuangan

Yaitu menggunakan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran

D. Audit

Yaitu melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran.

Meter and Horn dalam Sujianto (2008 :71) mencoba mengadopsi model sistem Kebijakan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijakan bisa di Realisasikan menjadi hasil Kebijakan. Terdapat Enam Variabel yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan antara lain :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Yaitu memberikan perhatian utama pada factor factor yang mempengaruhi dan menentukan hasil kerja, maka identifikasi indicator indicator hasil kerja Merupakan hal yang penting karena indicator ini menilai sejauh mana standard an tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan.

2. Sumber Daya Kebijakan

Yaitu kebijakan mencakup lebih dari sekedar standard dan sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

3. Karakteristik Pelaksana

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif ,kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuatan kebijakan.

4. Aktifitas Keamanan dan Komunikasi antar Organisasi

Yaitu implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Yang pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi

pelaksana, Bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

6. Disposisi sikap para pelaksana
Yaitu pemikiran pelaksanaan kegiatan terhadap program itu diterapkan, hal ini dapat berupa sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan.

B. Penelitian Terdahulu

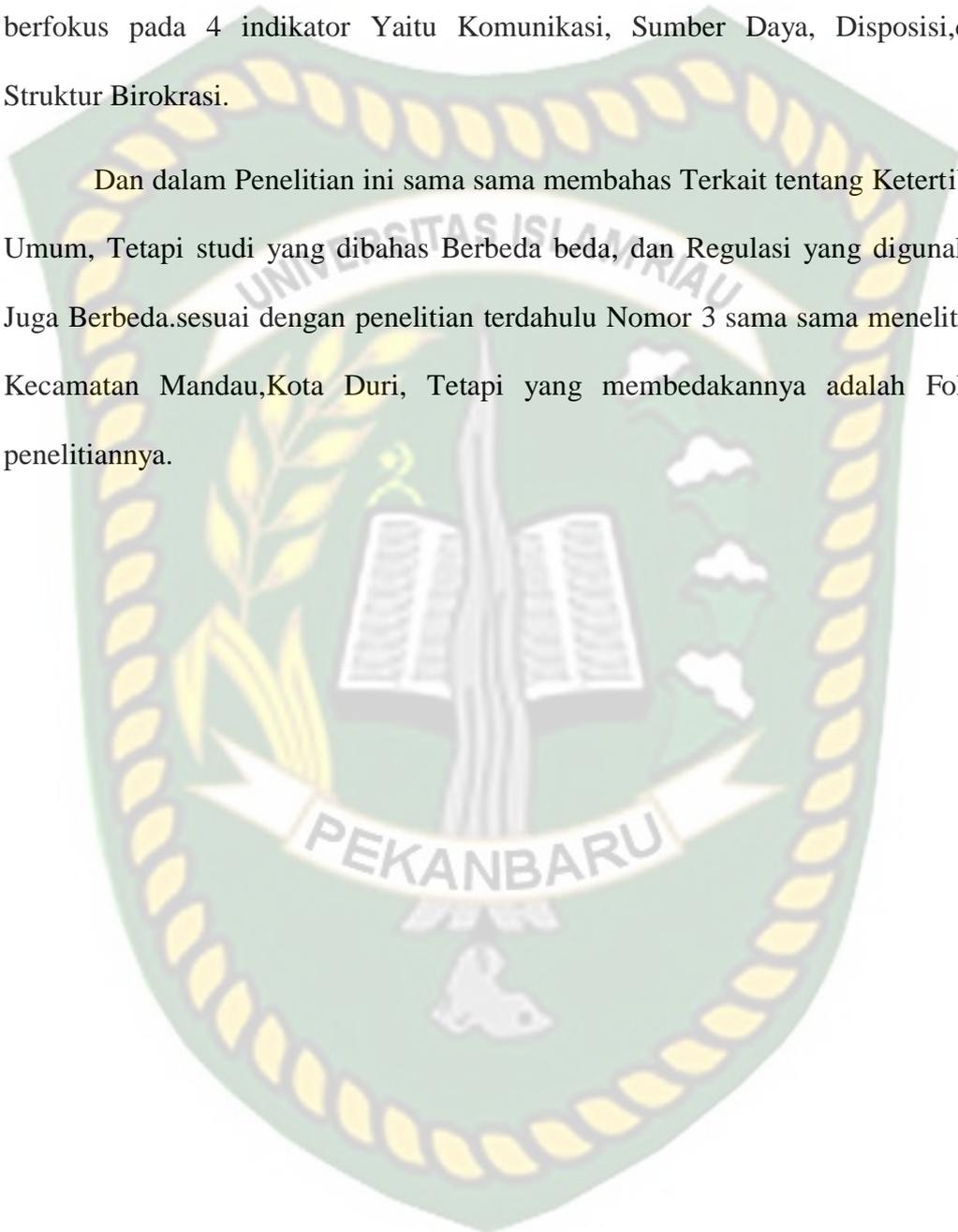
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Tipe penelitian
1	2	3	4
1	Randiansyah Putra 117310796	Evaluasi peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum (Studi larangan menangkap ikan menggunakan bahan kimia beserta strum.	Menggunakan Metode Kuantitatif dengan tipe penelitian survey
2	Richo Jefrianto 117310823	Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota tanjung pinang no 8 tahun 2005 tentang ketertiban, dan keindahan lingkungan (studi penertiban kegiatan usaha dan atau dagang di kawasan tepi laut kota tanjung pinang)	Menggunakan Metode Kuantitatif dengan tipe penelitian survey
3	Rekno Wahyuni 107310312	Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bengkalis tentang ketertiban umum (Studi pelanggaran berjualan di pinggir jalan umum di kota duri)	Menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif

Yang membedakan penelitian ini dengan Penelitian Diatas yang paling menonjol adalah Terkait dengan Konsep dan Teori yang digunakan, pada Penelitian terdahulu diatas mengenai judul mereka Menggunakan Evaluasi, dan Menggunakan Konsep Evaluasi yang merupakan Teori dari Wiliiam N. Dunn yang menyatakan bahwa Evaluasi berfokus pada Efektifitas, Efisiensi,

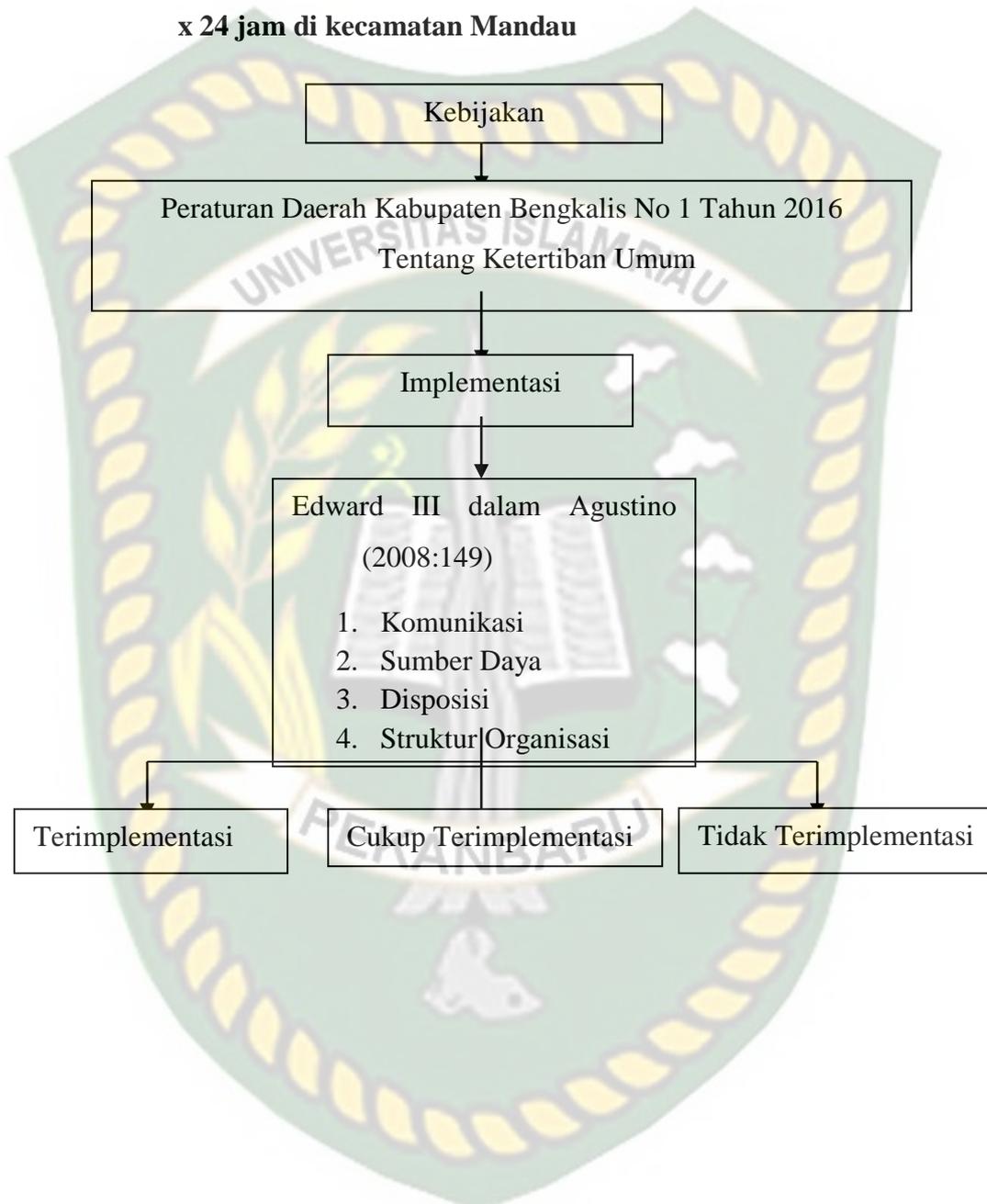
Kecukupan, Perataan, Responsibilitas, dan Ketetapan. sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan Konsep Implementasi Kebijakan yang merupakan Teori dari George C. Edwards III yang mana dalam penentuan suatu kebijakan harus berfokus pada 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Dan dalam Penelitian ini sama-sama membahas terkait tentang Ketertiban Umum, Tetapi studi yang dibahas berbeda-beda, dan Regulasi yang digunakan juga berbeda. sesuai dengan penelitian terdahulu Nomor 3 sama-sama meneliti di Kecamatan Mandau, Kota Duri, Tetapi yang membedakannya adalah Fokus penelitiannya.



C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1. Kerangka pikir Implementasi perda kabupaten Bengkalis 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum studi tamu wajib lapor 1 x 24 jam di kecamatan Mandau



C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka penulis perlu untuk mengoperasionalkan konsep konsep tersebut, antara lain :

1. Pemerintahan adalah Suatu Badan yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dan mengordinasikan, memimpin, dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
2. Kebijakan adalah suatu tindakan yang ditetapkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki hambatan hambatan dan Kesempatan terhadap kebiakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
3. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
4. Tamu wajib lapor adalah orang yang datang ke suatu tempat dengan tujuan untuk menetap wajib melaporkan dirinya kepada RT/RW Setempat
5. RT atau rukun tentangga adalah lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh (pemerintah desa) kepala desa/lurah
6. Komunikasi Adalah Penunjukkan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang menginformasikan bahwa setiap setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi

efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran

7. Sumber Daya adalah factor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumber daya walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak berjalan efektif.
8. Disposisi adalah watak, Sikap dan karakteristik yang dimiliki implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis,
9. Struktur birokrasi adalah hal yang harus ada dalam mempengaruhi implementasi program atau kebijakan yang mencakup struktur birokrasi dan pola hubungan. Struktur birokrasi Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legislative dan eksekutif ,kekuasaan organisasi, Tingkat Trasparant komunikasi dengan pihak lain.
10. Ketertiban adalah suatu Penentu kehidupan hasil dari ketentuan ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

11. Satuan Polisi Pamong Praja Atau Satpol PP adalah dinas yang terkait dalam pelaksanaan pengamanan atas ketertiban umum .



D. Operasional Variabel

Table II.2 Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum (Studi Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam Di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti.)

Konsep	Variabel	Indikatorr	Sub Indikatorr	Skala ukuran
1	2	3	4	5
<p>Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang Undang di tetapkan yang memberi otoritas Program, Kebijakan,Keuntungan (Benefit) atau suatu jenis Keluaran yang nyata,</p> <p>George C.Edwards III menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap Studi Implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah inti dan menanyakan apakah kondisi untuk Pelaksanaan kebijakan yang berhasil ataupun tidak.</p>	<p>Implementasi peraturan daerah kabupaten bengkalis no 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum</p>	Komunikasi	<p>a. Adanya sosialisasi</p> <p>b. Masyarakat tahu akan sanksi</p>	<p>Terimplementasi Cukup</p> <p>terimplementasi Kurang</p> <p>terimplementasi</p>
		Sumber Daya	<p>a. Tersedianya Personil yang cukup</p> <p>b. Tersedianya fasilitas yang mendukung</p> <p>c. Tersedianya dana untuk kegiatan operasional</p>	<p>Terimplementasi Cukup</p> <p>terimplementasi Kurang</p> <p>Terimplementasi</p>
		Disposisi	<p>a. Adanya pemahaman yang Serupa terkait isi aturan dan pelaksanaan</p> <p>b. Adanya sikap baik dari masyarakat untuk bertanggung jawab patuh pada aturan</p>	<p>Terimplementasi Cukup</p> <p>terimplementasi Kurang</p> <p>terimplementasi</p>
1	2	3	4	5

		Struktur Birokrasi	<p>a. Adanya kejelasan fungsi dan kewenangan yang dimiliki instansi terkait</p> <p>b. Adanya koordinasi antara pihak terkait dengan sasaran kebijakan</p>	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplementasi
--	--	--------------------	---	--

E. Teknik pengukuran

Implementasi peraturan daerah kabupaten baengkalis no 1 tahun 2016 tentang ketertiban Umum dapat dilakukan pengukuran variabel sebagai berikut :

Terimplementasi :Apabila seluruh Indikatorr variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban Responden untuk keseluruhan Indikatorr variabel adalah 67% - 100%

Kurang terimplementasi :Apabila Seluruh Indikatorr variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban Responden untuk keseluruhan Indikatorr variabel adalah 34% - 66%

Tidak Terimplementasi : Apabila Seluruh Indikatorr variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban Responden untuk keseluruhan Indikatorr variabel adalah 0% - 33%

Adapun Pengukuran dan, penilaian masing masing Indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Terimplementasi : Apabila nilai rata rata persentase hasil Penelitian pada Indikatorr Komunikasi yang telah ditetapkan berada pada kategori 67% - 100%

Kurang Terimplementasi : Apabila nilai rata rata persentase hasil penelitian pada Indikatorr Komunikasi yang telah ditetapkan berada pada kategori 34% - 66%

Tidak Terimplementasi : Apabila nilai rata rata persentase hasil penelitian pada Indikatorr bimbingan yang telah di tetapkan berada pada kategori 0% - 33%

2. Sumber Daya

Terimplementasi : Apabila nilai rata rata persentasi hasil penelitian pada Indikatorr Sumber Daya yang telah ditetapkan berada pada kategori 67% - 100%

Kurang Terimplementasi : Apabila nilai rata rata persentasi hasil penelitian pada Indikatorr Sumber Daya yang telah ditetapkan berada pada kategori 34% - 66%

Tidak Terimplementasi : Apabila Nilai rata rata persentasi pada Indikatorr pengarahannya yang telah ditetapkan berada pada ketegori 0% - 33%

3. Disposisi

Terimplementasi : Apabila nilai rata rata persentasi hasil penelitian pada Indikatorr Disposisi yang telah di tetapkan berada pada kategori 67% - 100%

Kurang Terimplementasi : Apabila nilai rata rata persentasi hasil penelitian pada Indikatorr Disposisi yang telah ditetapkan berada pada kategori 0% - 33%

Tidak Terimplementasi : Apabila Nilai rata rata persentasi pada Indikatorr Disposisi yang telah ditetapkan berada pada ketegori 0% - 33%

4. Struktur Birokrasi

Terimplementasi : Apabila nilai rata rata persentasi hasil penelitian pada Indikatorr Disposisi yang telah di tetapkan berada pada kategori 67% - 100%

Kurang Terimplementasi : Apabila nilai rata rata persentasi hasil penelitian pada Indikatorr Struktur yang telah ditetapkan berada pada kategori 0% - 33%

Tidak Terimplementasi : Apabila Nilai rata rata persentasi pada Indikatorr Struktur yang telah ditetapkan berada pada ketegori 0% - 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan Rumusan Penelitian, penulis menggunakan Metode Kuantitatif dengan Teknik Analisis Deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas sebagai Kondisi Situasi Variabel yang ada pada Objek Penelitian ini

Dengan Demikian, Peneliti Ingin menggambarkan, meringkaskan sebagai keadaan, dan situasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang jelas Terkait penelitian yang dimaksud.

B. Lokasi Penelitian

penulis tertarik untuk menjadikan kecamatan Mandau sebagai lokasi penelitian, karena Mandau merupakan kecamatan yang memiliki penduduk yang sangat banyak, oleh karena itu Ke ikut sertaan masyarakat sangat perlu untuk mewujudkan ketertiban salah satunya tertib tamu wajib lapor dalam suatu wilayah, adapun pemilihan lokasi penelitian dikarenakan melihat koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum di kecamatan Mandau tidak terlaksana dengan baik terlihat dari komunikasi antara RT/RW, Lurah dan masyarakat. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam ini.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah Keseluruhan Wilayah yang terdiri atas objek / subjek yang memiliki kualitas dan ciri ciri tertentu yang di tetapkan peneliti untuk dipelajari dan dipahami di masa yang akan datang Sugiyono (2011;80)

Menurut Sugiyono (2011: 81) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk penentuan sampel harus menggunakan cara tertentu yang di dasarkan oleh pertimbangan yang ada.

Dengan demikian populasi pada penelitian ini yaitu Pemerintah Kecamatan Mandau, Kelurahan Gajah Sakti, Dan Masyarakat Kecamatan Mandau.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan sampel.

No	Kedudukan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Lurah Gajah Sakti	1	1	100 %
2	Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	1	100 %
3	RT/RW Kelurahan Gajah Sakti	12	6	50%
4	Satpol PP	10	5	50%
5	Masyarakat Kelurahan Gajah Sakti	9308	50	5%
	Jumlah	9333	63	10 %

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik Sampling yaitu bagian dari jumlah dan ciri ciri yang dimiliki Populasi yang menjadi penarikan sampel penelitian ini yaitu Teknik Jenuh Sampling dan Teknik Insidental sampling.

Teknik Jenuh Sampling adalah Teknik Penarikan Sampel jika semua Kelompok populasi digunakan sebagai sampel Karena Jumlah Populasinya Sedikit Mudah Terjangkau oleh peneliti

Teknik Insidental Sampling adalah teknik penarikan Sampel Berdasarkan Ketidak sengaja, yaitu siapapun yang secara kebetulan/ incidental bertemu dengan dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang secara tiba tiba ditemui itu pas sebagai sumber data. (Sugiyono 2003;03)

Adapun Sub populasi yang menggunakan teknik jenuh sampling adalah masyarakat kecamatan Mandau, dan kelurahan gajah sakti. Sedangkan yang menggunakan teknik incidental sampling ialah RT Sebagai pemberi pelayanan dan penjaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

E. Jenis Dan sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Responden melalui wawancara, dan observasi. Berupa identitas Responden dan tanggapan Responden Pelaksanaan Aturan tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat sebagai Pelengkap data primer yang diperoleh dengan pengumpulan dokumen,data tersebut tidak perlu di olah lagi.

F. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh sebuah Data dan Informasi lengkap dan dibutuhkan sebagai acuan dalam Penulisan ini. Menurut Sugiyono (2012:137) berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian Kuantitatif dapat dilakukan dengan cara :

1. Observasi, Digunakan untuk mengamati langsung objek penelitian untuk melihat berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan.
2. Teknik Wawancara (Interview), Digunakan untuk memperoleh informasi Terkait dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau Responden.
3. Teknik Angket (Quisioner),yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan untuk di isi oleh Responden, beberapa daftar

pertanyaan tertulis dengan perimbangan bahwa Responden adalah subjek yang dianggap tahu tentang objek peneliti. Seperti tanggapan Responden terhadap pelaksanaan ketertiban umum di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis tentang Peran Serta Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Tamu Wajib Lapor 1 X 24 Jam .

4. Dokumentasi, Digunakan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan keadaan lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara pencatatan atau Pendokumentasian, pendokumentasian tersebut dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal kegiatan yang berhubungan dengan maslaah yang diteliti.

G. Teknik Analisi Data

Bogdan dan Biklen, (1992) Analisis Data adalah Proses mencari atau menyusun Data yang Terstruktur melalui hasil Wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara keseluruhan untuk menambah wawasan peneliti terhadap apa yang ditemukan. Menurut Nasution (1988) berpendapat analisis data ialah proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan.

Apabila semua data sudah terkumpul, Selanjutnya di Kelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk Table, Angka, Persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian di Analisis dengan menjelaskan atau memaparkan data yang terkumpul menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu pemikiran yang memberikan gambaran jelas sesuai kenyataan atau fakta fakta dilapangan untuk kemudian diambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk Penelitian yang di dasarkan tata Cara ilmiah.

I. Rencana sistematika laporan penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada Bab ini berisikan penguraian atau penjelasan dari pengertian definisi, konsep dan teori teori yang menyangkut studi kepustakaan. Dan dilanjutkan dengan Kerangka fikir, Konsep Operasional, Operasional Variabel, serta Teknik Pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data, Jadwal Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Deskripsi dan Gambaran umum tentang Situasi dan Konsidi Lokasi Penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang penulis teliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan Kesimpulan dari hasil Penelitian yang penulis temukan dan diberikn saran atas temuan tersebut



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

1. Keadaan Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Dengan ibu kota Bengkalis. Bengkalis Sejak dulunya dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar baik di sektor migas yaitu minyak bumi maupun non migas berupa hasil komoditi perkebunan, pertanian, dan pariwisata.

Selain akan potensi sumber daya alamnya, wilayah ini Memiliki letak yang strategis, Sebab ia berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Singapura (IMG-GT)

sebelum Indonesia merdeka sebagian besar Bengkalis berada diwilah Pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah di tetapkan Kemerdekaan Negara, dan di ikuti dengan penyerahan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, Maka Seluruh Wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan siak sri indrapura, Termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Priode 1956 yakni berdasarkan undang undang Nomor 12 tahun 1956 dibentuklah Kabupaten daerah tingkat ke II Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada di bawah provinsi Sumatra tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan Di Sumatra utara, Dengan Dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau berdasarkan undang undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan pembentukan kabupaten daerah tingkat I Sumatra Barat, Riau, dan Jambi, Maka

kabupaten daerah tingkat II Bengkalis Berada dalam Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau.

Bengkalis Beriklim Tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut, dengan Temperatur berkisar $26^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$. Terdapat dua musim yang ada di wilayah ini, Musim Hujan biasa terjadi antara bulan September hingga Januari, dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 – 4.4078 mm/ tahun. Sedangkan periode kering (Musim Kemarau) Biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan Kota Berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kabupaten Bengkalis. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan Rumah Penduduk, Penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum lainnya, sehingga kesejahteraan penduduk kabupaten Bengkalis tetap terjamin.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kabupaten Bengkalis adalah suku Melayu, namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini, seperti suku Jawa, suku Batak, suku Minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah, pegawai swasta dan pedagang.

B. Gambaran Umum Kecamatan Mandau

1. Keadaan Geografis dan Demografis Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau yaitu salah satu yang termasuk dalam wilayah administratif, Yang memiliki batas batas wilayah :

Sebelah utara : Kecamatan Bukit Batu Dan Kota Dumai

Sebelah Selatan : Kecamatan Pinggir

Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir

Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu

Daerah ini terbentang antara $0^{\circ}56'12$ LU s/d $1^{\circ}28'17$ LU, $100^{\circ}56'10$ BT s/d $101^{\circ}43'26$ BT, dengan ibu kotanya Air Jamban dan kecamatan ketiga terluas wilayahnya setelah Pinggir dan Bukit Batu. Secara Topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan.

Mandau Merupakan Hasil perluasan kabupaten bengkalis menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan kabupaten Rohil serta 1 Kota Madya Dumai. Wilayah Kecamatan Mandau ini terletak pada ketinggian 6 M Dari Permukaan Laut. Dengan ketinggian tersebut maka pada umumnya kecamatan Mandau banyak tanah yang relative datar apalagi bila diperhatikan fisiologinya dimana tingkat kesuburan tanahnya sangat tinggi sehingga perusahaan besar maupun masyarakat banyak yang melakukan kegiatan perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet.

Kecamatan ini Disebut juga dengan Bengkalis Daratan, Dikarenakan letak Kecamatan Mandau yang berada di antara kabupaten lain yang ada di provinsi Riau, Sedangkan Bengkalis Sendiri berupa sebuah pulau yang berada di antara

Kabupaten/ kota Madyadi riau selat malaka, Luas Kecamatan Mandau 937,47 Km² dengan suhu maksimum 34⁰c dan suhu minimum 25⁰c

Kecamatan Mandau adalah Kecamatan terbesar sekaligus Kecamatan yang memiliki Penduduk yang terpadat di Kabupaten Bengkalis. Tingginya tingkat perpindahan penduduk yang dipengaruhi banyaknya perusahaan Migas (Minyak dan Gas), Menjadai penarik tersendiri bagi sebagian orang untuk tinggal dan mencari nafkah di daerah ini, Munculnya Perusahaan Perusahaan ini dilatar belakangi oleh kekayaan sumber daya minyak bumi yang terkandung di dalamnya.

Hal ini adalah yang menjadi salah satu alasan mengapa Duri menjadi daerah yang paling padat penduduk diantara daerah lainnya di kabupaten Bengkalis.

2. Perekonomian Kecamatan Mandau

Ladang Minyak Duri telah Di eksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia, Dengan rata rata Produksi saat ini 400.000 – 500.000 barel per hari .Selain kaya akan hasil Minyak bumi, Sektor Industri juga memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Tercatat ada dua industry besar dan lima industry sedang yang sedang berjalan di Daerah ini. Selain itu juga terdapat Industri kecil 96 Unit dan Industri Mikro 233 Unit, pada tahun 2011. Tidak hanya Industri, Berdagang juga merupakan salah satu penggerak perekonomian Masyarakatnya. Sebagai Wilayah Perlintasan Antar Provinsi dan Antar Kabupaten.Daerahini

Memiliki sarana Perdagangan dan Akomodasi yang terbilang dalam jumlah yang Relatif Banyak.

C. Gambaran Umum Kelurahan Gajah Sakti

1. Sejarah Dan Keadaan Geografis Kelurahan Gajah Sakti

Gajah Sakti diambil cerita asli seorang Pria yang bernama sakti yang mempunyai seekor gajah, waktu itu gajah mengamuk kepada pemiliknya hingga ia mati karena di injak oleh peliharaannya sendiri, sampai jejak kakinya tersebut dalam dan berbentuk sumur yang diberi nama sumur gajah. Sumur gajah sakti tersebut terdapat di tengah tengah perumahan warga, dimana memiliki bermacam macam suku yaitu melayu, minang, dan batak, sampai saat ini sumur gajah tersebut sangat dimanfaatkan oleh masyarakat karena meskipun musim kemarau, tetapi sumur tersebut tidak pernah kering.

Kelurahan ini Merupakan salah satu dari 9 Kelurahan Dengan Luas 200 Km² Yang memiliki RT 51 Dan RW 11, Jumlah penduduk Kelurahan gajah sakti adalah 14.732 Jiwa. Kelurahan Gajah Sakti beralamatkan di Jalan Jawa No 73 Duri.

2. Keadaan Penduduk Kelurahan Gajah Sakti

Jumlah Penduduk yang ada di Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau akan dijelaskan pada table dibawah ini

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	5.065	60%
2	Wanita	4.243	50%
	Jumlah	9308	100%

Sumber : Kantor Kelurahan Gajah Sakti

Dari Tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di wilayah ini Penduduk Pria lebih Besar daripada Jumlah Penduduk Wanita yaitu 5.065 berbanding 4.243.

3. Mata Pencaharian

Pekerjaan Masyarakat kelurahan Gajah sakti Bermacam ragam yang lebih Menonjol adalah Buruh.

Tabel IV.2: Jenis dan Jumlah Pekerjaan Penduduk Kelurahan Gajah sakti

No	Potensi Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS / Honorer	342
2	TNI/Polri	10
3	Guru	112
4	Karyawan BUMD	10
5	Wiraswasta/Pedagang	410
6	Petani	41
8	Tukang	32
9	Buruh	765
10	Penjahit/ Pengrajin	32
11	Pemulung	8
12	Swasta CPI	284

Sumber : Kantor Kelurahan Gajah Sakti 2017

Dari Uraian diatas Dapat diketahui bahwa pekerjaan yang lebih dominan di Kelurahan Gajah Sakti Adalah Buruh yang berjumlah 765 Orang, Kemudian Disusul Oleh Wira Swasta Berjumlah 410

4. Agama Dan Kepercayaan

Berkaitan Ketentuan Negara, kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus dikembangkan untuk megatur kehidupan masyarakat. Salah satu caranya adala dengan membangun sarana dan prasarana ibadah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penduduk kelurahan gajah sakti mayoritas penduduk memeluk agama islam, dan sebagian yang lain memeluk agama Kristen dan Budha,

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk menurut penganut Agama yang

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6.268
2	Kristen Protestan	1.157
3	Kristen Katolik	1.145
4	Budha	645
5	Hindu	-

Sumber : Kantor Kelurahan Gajah Sakti 2017

5. Tingkat Pendidikan

Dalam Pemerataan Pembangunan pendidikan dan untuk meningkatkan tingkat pemahaman Masyarakat dalam menyikapi kondisi perkembangan informasi yang kian meningkat, Masyarakat Kelurahan Gajah Sakti memiliki tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat Analisa Masyarakat terhadap sistem pemerintahan Kecamatan Juga berbeda.

Tabel IV.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Gajah Sakti.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	1.005
2	SMP	3.110
4	SMA	5.128
5	Diploma	523
6	Tidak Sekolah	207
7	Sarjana	741

Sumber : Kantor Kelurahan Gajah Sakti 2017

Dari data tersebut Dapat Dilihat bahwa Jawaban Responden yang dilihat dari tanggapan dinilai memiliki kemampuan pemahaman yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Tingkat pendidikan Responden Sebagian Besar Adalah Tamatan SLTA Yang Berjumlah 6.578 Orang

6. Struktur Organisasi Kelurahan Gajah Sakti

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kelurahan Gajah Sakti.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini Terdiri dari hasil penelitian ,Sebelum Membahas Lebih tentang pembahasan terhadap Penelitian Ini yakni Tentang “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum ” Hal yang paling utama peneliti lakukan yaitu, memperlihatkan Data data yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat pada saat melakukan penelitian Untuk Mengetahui Hasil tanggapan Responden yang terpilih dalam penelitian ini.

Sebelum memaparkan hasil Tanggapan Responden Terlebih dahulu akan dijelaskan/ Dipaparkan Data Tentang Identitas Responden Meliputi Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Umur.

A. Identitas Responden

Pada Bab Ini akan diawali dengan pembahasan mengenai Identitas Responden Yang Terdiri dari Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Dan umur dan Masa Kerja Serta Pangkat/ Golongan.

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan seseorang Sedikit banyak berdampak pada Struktur cara berfikir, bersikap serta wawasan atau pengetahuan yang dimilikinya. Biasanya orang yang berpendidikan lebih tinggi maka pola pikirnya juga semakin matang, semakin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan/masalah.

Tabel V.1. Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unsur Responden	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		SMA	D.III	S.1	
1	Pegawai Kelurahan	12	2	2	16
2	Satpol PP	10	1	4	15
3	RT/RW	9	3	4	16
4	Masyarakat	19	5	2	25
5	Jumlah	54	11	12	63

Sumber : Data Lapangan 2018.

Dapat diketahui bahwa Tingkat Pendidikan Responden bervariasi, yaitu yang paling memiliki pendidikan paling dominan adalah SMA dengan jumlah berjumlah 54 orang, S.1 berjumlah 12 orang, dan D.3 berjumlah 11 orang, sehingga jawaban yang diperoleh dapat sangat baik karena Responden yang ada pada umumnya memiliki Pendidikan yang sama.

2. Jenis Kelamin

Pada Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin ini penulis membedakan antara Jenis Kelamin Pria dan Wanita.

Tabel V.2: Distribusi Menurut Jenis Kelamin

No	Unsur Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pegawai Kelurahan	10	6	16
2	Satpol PP	9	6	15
3	RT/RW	15	1	16
4	Masyarakat	17	8	25
Jumlah		51	21	63

Sumber : Data Lapangan 2018.

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa jenis kelamin Responden beragam, Responden banyak laki-laki, oleh karena itu diharapkan dapat lebih meningkatkan pelaksanaan ketertiban menjadi lebih baik lagi.

3. Tingkat Umur

Umur Responden Sangat Mempengaruhi Terhadap Ketelitian Pegawai dalam bekerja dan juga tingkat kematangan Berfikir. Dimana Pegawai yang telah Memiliki kestabilan Emosional dalam menghadapi pekerjaan atau lebih matang cara berfikirnya dibandingkan dengan pegawai yang masih muda . Biasanya Juga memiliki Rasa Tanggung Jawab yang besar Dibandingkan Dengan Pegawai Yang Masih Muda.

Tabel V.3 : Distribusi Menurut Umur.

No	Unsur Responden	Tingkat Umur				Jumlah
		17-27 th	28-38 th	39-49 th	>50 th	
1	Pegawai Kelurahan	3	9	2	-	16
2	Satpol PP	2	11	2	-	15
3	RT/RW	-	2	13	1	16
4	Masyarakat	4	7	14	-	25
Jumlah		9	30	31	1	63

Sumber : Data Lapangan 2018.

Berdasarkan Data Diatas Dapat Dilihat dimana berdasarkan tingkat umur lebih banyak pada tingkatan usia 39-49 tahun sebanyak 31 orang, dengan demikian sistem kerja yang ada semakin baik, karena diharapkan pada umur tersebut pola fikir dalam melakukan penertiban semakin baik, sehingga hasil kerja yang di tunjukkan semakin baik pula.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Tamu Wajib Lapor 1 X 24 Jam Di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti).

Dengan Adanya pembentukan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari diberikannya otonomi Daerah Kepada suatu Daerah untuk mengatur dan

mengurus Rumah Tangga Daerah Masing masing, Berdasarkan Tujuan Otonomi Daerah Pada Hakikatnya untuk memperlancar pembangunan di tiap tiap daerah. Tugas utama pemerintah daerah terjadi perbedaan pemikiran tentang peran pemerintah terhadap rakyat: Pendapat pertama adalah pemerintah harus mengurangi campur tangan dalam mengatur masyarakat, Ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah harus dapat mengatur sebanyak sebanyak dari segi kehidupan Masyarakat, Karena cara itulah yang dapat menciptakan suatu Keteraturan dalam Hidup, Ketertiban, Keamanan, dan Kemajuan akan Dapat dipelihara dan dicapai. Selanjutnya dapat dilihat dari tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Aturan Kewajiban Tamu Wajib Lapor yang terdiri dari :

1. Komunikasi

Efetik atau tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan, salah satunya dipengaruhi oleh Komunikasi. Baik itu antara sesama Aparatur pemerintah, maupun antara Aparat Pemerintah dengan Masyarakat.

Tabel V.4. Penilaian terhadap jawaban Responden (Aparat Pemerintah) mengenai Komunikasi.

No	Sub Indikatorr (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Sosialisasi terhadap penertiban antara Aparatur terkait.	13	-	-	13(100%)
2	Sosialisasi pendataan 1x24 bagi masyarakat.	7	5	1	13(100%)
3	Sosialisasi Pelaksanaan penertiban antara Aparat pemerintah dengan Masyarakat.	8	5	-	13(100%)
Jumlah		28	10	1	39
Rata Rata		9	3	1	13
Persentase		70%	20%	10%	100%

Dari data tersebut Dapat diketahui bahwa 13 dari 13 orang Responden menyatakan Indikator Komunikasi pada Point 1 terkait dengan sosialisasi terhadap penertiban antara Aparatur terkait sudah dilaksanakan dengan Baik (Terimplementasi), pada point kedua terkait dengan sosialisasi pendataan masyarakat berdasarkan hasil tanggapan Responden bahwa 5 dari 13 menyatakan Kurang Terimplementasi, dan juga terdapat jawaban lainnya bahwa ada 1 dari 13 Responden yang mengatakan Tidak Terimplementasi. sedangkan Terkait pada point ke 3 mengenai sosialisasi pelaksanaan penertiban antara Aparat pemerintah dengan Masyarakat berdasarkan tanggapan Responden bahwa 5 dari 13 Responden menyatakan Kurang Terimplementasi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Indikator Komunikasi sudah Dijalankan Dengan Baik,

Sesuai dengan Hasil Wawancara Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau, Kelurahan Gajah Sakti Dan Ketua RT/RW Kelurahan Gajah Sakti Pada Tanggal 19 November 2018 yang menyatakan Bahwa :

“Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Mandau dan Lurah Gajah Sakti Telah melakukan Sosialisasi Melalui pembinaan secara langsung maupun melalui surat himbauan dan surat peringatan yang diberikan ke kelurahan dan Kelurahan meyebarkan ke setiap RT/RW Yang Berada di Kelurahan Gajah sakti, Namun masih banyak juga Warga pendatang Yang datang Untuk menetap Tetapi Tidak Melaporkan Dirinya 1 x24 jam Ke RT/RW Setempat. “

Sedangkan Tanggapan Menurut Responden (Masyarakat) Mengenai Indikator Komuniiasi Adalah :

Tabel V.5. Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Masyarakat) Tentang Indikatorr Komunikasi.

No	Sub Indikatorr (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Sosialisasi terhadap penertiban antara Aparatur terkait	7	30	13	50(100%)
2	Sosialisasi pendataan 1x24 jam bagi masyarakat	10	27	13	50(100%)
3	Sosialisasi Pelaksanaan penertiban antara Aparat pemerintah dengan Masyarakat	8	24	18	50(100%)
Jumlah		25	81	44	150
Rata Rata		8	27	15	50
Persentase		20%	50%	30%	100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator Komunikasi sudah terlaksana cukup baik, hal itu dapat dilihat dari hasil persentasi jawaban pertanyaan pada poin pertama dan kedua dari ketiga poin pertanyaan.

Pada poin pertama mengenai Sosialisasi Terhadap penertiban antara Aparatur pemerintah terkait sebagian besar Responden sudah mengetahui tentang adanya Aparatur pemerintah terkait yang mengatur masalah penertiban. Begitu juga dengan poin kedua dari Indikatorr Komunikasi. namun masih ada yang belum mengetahui tentang program yang telah dibuat, bahwasanya bagi masyarakat yang datang bertamu lebih dari 1x24 jam atau menetap harus mendatakan dirinya kepada RT/RW Setempat. dan pada poin ketiga mengenai sosialisasi penertiban antara Aparat pemerintah dengan masyarakat sudah dilaksanakan cukup baik (Kurang Terimplementasi), namun ada 18 dari 50 Responden yang menilai pelaksanaan sosialisasi penertiban antara Aparat

Pemerintah dengan masyarakat tidak berjalan Sebagai mana mestinya atau Tidak Terimplementasi.

Berdasarkan wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau pada tanggal pada tanggal 19 November 2018 dikatakan Bahwa:

“Terkait dengan sosialisasi Peraturan Daerah ini sudah dilakukan sosialisasi oleh Aparat terkait, tetapi kami selaku masyarakat kurang memahami secara jelas dari peraturan tersebut terkait dengan aturan Tamu wajib Lapor 1 x 24 jam”

Berdasarkan Hasil Observasi oleh peneliti berkaitan dengan Indikator Komunikasi, Peneliti Menilai bahwa terkait dengan Indikator Komunikasi dapat diketahui bahwa dari Aparat Pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah ini , tetapi Pihak Masyarakat masih ada yang kurang memahami Peraturan daerah ini secara jelas Khususnya terkait Dengan aturan Tamu wajib Lapor 1 x 24 jam, sehingga Pada Indikatorr Komunikasi ini dapat di Nilai “Kurang Terimplementasi.”

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan faktor yang sangat Berpengaruh terhadap keberhasilan Suatu Kebijakan. Dalam hal ini sumber daya lah yang membantu keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah ini, yaitu berupa jumlah Aparat pelaksana penertiban, Masyarakat, dan Sarana Berupa Pos Ronda Dan Siskamling sebagai solusi Penertiban.

Tabel V.6. Distribusi Penelitian Terhadap Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Tentang Indikator Sumber Daya.

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Pelaksanaan Penertiban di dukung dengan jumlah Aparat yang memadai	13	-	-	13(100%)
2	Tersedianya sarana penertiban bagi Aparat pelaksana penertiban	9	4	-	13(100%)
3	Keterlibatan seluruh Aparat dalam pelaksanaan penertiban	13	-	-	13(100%)
4	Tersedianya pos ronda dan siskamling	12	1	-	13(100%)
Jumlah		47	5	-	52
Rata Rata		12	1	-	13
Persentase		90%	10%	-	100 %

Sumber : Data Lapangan 2018.

Dari Tabel V.6. Dapat diketahui Bahawa Aparat pelaksana Penertiban bisa dinilai Baik (Terimplementasi), berdasarkan jawaban dari Responden yaitu pada point pertama terdapat 13 dari 13 Responden sudah mengetahui bahwa pelaksanaan penertiban sudah didukung oleh jumlah Aparat yang memadai. Pada poin ke dua Indikator sumber daya bisa dinilai Bagus,

Pada poin ke tiga mengenai keterlibatan seluruh Aparat terkait dalam melakukan penertiban sudah di Nilai Terimplementasi, berdasarkan hasil penelitian melalui Penyebaran Quisioner, karena 13 dari 13 Responden sudah menyatakan keterlibatan seluruh Aparat terkait. Pada poin ke Empat 1 dari 13 Responden yang menyatakan kurang tersedianya pos ronda dan siskamling dalam penanganan ketertiban terkait pendataan bagi tamu yg datang dan menetap tetapi tidak melaporkan dirinya 1 x 24 jam.

Berdasarkan hasil dari Wawancara dengan Aparat pelaksana Penertiban pada tanggal 19 November 2018 dikatakan :

“Dalam pelaksanaan penanganan ketertiban umum terkait dengan tamu wajib lapor 1 x 24 jam telah melibatkan seluruh Aparat terkait, dan juga dalam pelaksanaannya juga sudah dilengkapi dengan sarana yang memadai sehingga dalam Proses penertiban dapat berjalan dengan baik”

Sedangkan Tanggapan Dari Responden Masyarakat Mengenai pertanyaan pada Indikator Sumber daya :

Tabel V.7. Distribusi jawaban Responden (Masyarakat) tentang Indikatorr Sumber Daya.

No	Sub Indikatorr (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Pelaksanaan Penertiban di dukung dengan jumlah Aparat yang memadai	20	20	10	50(100%)
2	Tersedianya sarana penertiban bagi Aparat pelaksana penertiban	10	32	8	50(100%)
3	Keterlibatan seluruh Aparat dalam pelaksanaan penertiban	18	25	7	50(100%)
4	Tersedianya pos ronda dan siskamling	9	27	14	50(100%)
Jumlah		57	104	39	200
Rata Rata		14	26	10	50
Persentase		30%	50%	20%	100%

Sumber : Data Lapangan 2018.

Dari Tabel V.7. diketahui bahwa Indikator sumber daya berdasarkan jawaban dari Responden dapat dinilai Kurang Terimplementasi, karena 32 dari 50 orang Responden menyatakan sudah tersedianya sarana penertiban bagi Aparat pelaksana penertiban. dan pada point ketiga terdapat 25 dari 50 orang Responden

yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan Aparat dalam pelaksanaan ketertiban yang dinilai Kurang Terimplementasi, sedangkan ada juga jawaban Responden yang menyatakan kurang adanya ketertiban Aparat dalam pelaksanaan ketertiban yaitu 7 dari 50 Responden yang dinilai tidak Terimplementasi.

Dari hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau pada tanggal dikatakan :

“Terkait dengan Jumlah Aparat yang memadai menurut kami sudah cukup memadai dalam pelaksanaan ketertiban kemudian terkait dengan sarana, disini sarana menurut kami belum maksimal karna ada beberapa yang kurang seperti pos pos ronda dan Papan Pemberitahuan yang bertuliskan Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam di setiap RT”

Berdasarkan Hasil Observasi dengan Indikatorr Sumber Daya, Penulis Menilai bahwa terkait dengan Indikator Sumber Daya dapat diketahui Aparat Pemerintah sudah menjalankan penertiban ini dengan melibatkan seluruh Aparat terkait dan sarana yang memadai, Tetapi pihak Masyarakat menilai bahwa untuk jumlah Aparat pelaksana ketertiban sudah memadai tetapi mengenai sarana dan prasarana masih Dinilai Kurang Memadai sehingga penulis menilai untuk Indikatorr Sumber Daya dapat dikategorikan Kurang Terimplementasi.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal yang berkaitan terhadap tingkat keberhasilan dari Pelaksanaan kebijakan.

Tabel V.8. Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Terhadap Indikator Disposisi

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan	13	-	-	13(100%)
2	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat	13	-	-	13(100%)
3	Melakukan penertiban sesuai prosedur yang telah di tetapkan	12	1	-	13(100%)
Jumlah		38	1	-	39
Rata Rata		12	1	-	13
Persentase		90%	10%	-	100%

Dari Tabel di atas diketahui Pengawasan yang dilakukan Aparat pemerintah terhadap masyarakat bisa dinilai Baik (Terimplementasi), karena 13 dari 13 orang Responden menyatakan pengawasan terhadap Masyarakat sudah sepenuhnya di lakukan. Pada point kedua mengenai pembinaan terhadap masyarakat terdapat 13 dari 13 orang Responden yang menilai Baik (Terimplementasi) sedangkan pada point ketiga terdapat 1 dari 13 orang Responden yang menilai penertiban belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Kasi Trantib Kecamatan Mandau pada tanggal 19 November 2018 dikatakan :

“Kami selaku Aparat pelaksana peneritban telah melakukan pengawasan setiap hari sesuai degan hari kerja kemudian kami juga telah melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan tamu wajib lapor 1 x 24 jam dan juga dalam pelaksanaan peneritaban tamu wajib lapor ini kami sudah melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan prosedur dan SOP(Standar Operasional Prosedure) yang berlaku agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar”

Sedangkan Tanggapan Responden (Masyarakat) Berdasarkan Indikator Disposisi adalah :

Tabel V.9. jawaban Responden (Masyarakat) terhadap Indikator Disposisi.

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan	14	20	16	50(100%)
2	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat	13	26	11	50(100%)
3	Melakukan penertiban sesuai prosedur yang telah di tetapkan	4	37	9	50(100%)
Jumlah		31	83	36	150
Rata Rata		10	28	12	50
Persentase		20%	50%	30%	100%

Berdasarkan data V.9 dapat diketahui pengawasan yang dilakukan oleh Aparat pemerintah telah dilakukan sebagaimana mestinya namun masih belum berjalan sepenuhnya, karena banyak masyarakat yang bertamu atau menetap tetapi tidak melaporkan dirinya 1 x 24 jam. Dan pada poin ke dua mengenai pembinaan terdapat masyarakat yang Responden menilai kurang terimplementasi, karena terdapat 26 dari 50 orang Responden yang menilai kurang terimplementasi .karena terdapat 11 dari 50 orang Responden yang menilai pembinaan terhadap masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Begitu juga dengan point ketiga. Bahwa masih banyaknya Responden yang menilai pelaksanaan penertiban dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dinilai cukup baik/ Kurang Terimplementasi.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Gajah sakti Kecamatan Mandau pada tanggal 19 November 2018 dikatakan :

“Terkait dengan pengawasan memang sudah ada dilaksanakan oleh Aparat pemerintah tetapi kami juga tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak kemudian untuk pembinaan juga dilaksanakan oleh Aparat pemerintahan walupun terdapat masyarakat yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut dengan beberapa alasan”

Berdasarkan pengamatan Langsung oleh peneliti berkaitan dengan Indikator Disposisi, Penulis Menilai bahwa terkait dengan Indikator Disposisi dapat diketahui bahwa dari Aparat pemerintah untuk Indikator pertanyaan ini Aparat telah melakukan pengawasan sesuai dengan Prosedur dan SOP (Standar Operasional Prosedure) yang berlaku dan juga telah dilakukannya pembinaan kepada masyarakat tetapi dari pihak masyarakat menilai untuk pengawasan memang sudah dijalankan tetapi mereka tidak ngetahui apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan pembinaan juga telah dilaksanakan kepada beberapa masyarakat tidak secara keseluruhan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah suatau tindakan dan sejauh mana ketertiban pemerintah melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat.

Berikut tanggapan Responden (Aparatur Pemerintah) Mengenai Indikatorr Struktur Birokrasi.

Tabel V. 10. Tanggapan Responden (Aparat Pemerintah)

No	Sub Indikatorr (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Adanya pembagian tugas antara pihak atau Aparat dalam pelaksanaan penertiban	13	-	-	13(100%)
2	Adanya kerjasama antara pihak terkait dalam melaksanakan penertiban	12	1	1	13(100%)
3	Tanggung jawab seluruh Aparat terkait untuk bekerja secara efektif	9	4	-	13(100%)
Jumlah		34	5	1	40
Rata Rata		11	1	1	13
Persentase		80%	10%	10%	100%

Dari uraian V.10 Diketahui sudah adanya pembagian Tugas yang jelas antara pihak atau Aparat Terkait namun jika dinilai dari kerjasama masih Kurangnya Kerjasama antara Aparat terkait dalam melakukan penertiban,hal ini diketahui karena setiap dilakukan pendataan kembali terhadap masyarakat yang ada, pasti data yang awal tidak sesuai dengan data yang terbaru.hal ini terjadi karena adanya Aparat yang kurang bertanggung jawab dan kurang telitinya Aparat untuk mendata. Hal ini juga berpengaruh terhadap efektifitas kerja Aparat dalam melaksanakan penertiban.

Dari Hasil wawancara dengan Aparat pemerintah pada tanggal 19 November 2018 dikatakan :

“Untuk pelaksanaan penertiban ini terkait dengan pembagaian tugas kami sudah sampaikan dalam saat sosialisasi kepada masyarkat dan juga kami juga sudah bekerja secara efektif sesuai dengan prosedur dan sop yang telah di tetapkan terkait dengan tamu wajib lapor 1 x 24 jam”

Sedangkan Tanggapan Responden (Masyarakat) Berdasarkan Indikator Struktur Birokrasi adalah :

Tabel V.11. Tanggapan Responden (Masyarakat) Terkait indikator Struktur Birokrasi.

No	Sub Indikatorr (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Adanya pembagian tugas antara pihak atau Aparat dalam pelaksanaan penertiban	14	25	11	50(100%)
2	Adanya kerjasama antara pihak terkait dalam melaksanakan penertiban	7	33	10	50(100%)
3	Tanggung jawab seluruh Aparat terkait untuk bekerja secara efektif	7	31	12	50(100%)
Jumlah		28	89	32	150

1	2	3	4	5
Rata Rata	9	30	11	50
Persentase	10%	60%	30%	100%

Berdasarkan Tabel V.11 diketahui bahwa masyarakat tidak mengetahui bahwa siapa saja Aparat yang bertanggung jawab melakukan penertiban disebabkan tidak adanya sosialisasi mengenai siapa saja atau badan apada saja yang bertanggung jawab melakukan penertiban ,namun masyarakat menganggap kurangnya kerjasama antara pihak terkait dalam melaksanakan ketertiban, sehingga masih banyaknya masyarakat yang tinggal di suatu daerah tetapi tidak melakukan pendataan dirinya.ini dapat dilihat pada Indikatorr ke 2 terdapat 10 dari 50 orang Responden yang menilai tidak baiknya kerjasama antara Aparat terkait dalam melaksanakan tugasnya. sedangkan pada Indikatorr pertama Responden menilai pembagian tugas yang dilaksanakan antar Aparat pemerintah sudah cukup baik, ini dapat dilihat adanya 25 dari 50 Responden yang menilai cukup baik/ Kurang Terimplementasi.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti pada tanggal 19 November 2018 dikatakan :

“Kami tidak seluruhnya mengetahui terkait dengan pembagian tugas yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penertiban tamu wajib lapor 1 x 24 jam dikarenakan ada beberapa masyakat yang tidak ikut dalam proses sosialisasi, dan menurut kami Aparat bekerja belum efektif karena masalah terkait dengan tamu wajib lapor 1 x24 jam masih juga terjadi”

Sesuai dengan Observasi atau pengamatan Langsung oleh peneliti berkaitan dengan Indikator Struktur Birokrasi, Penulis menilai terkait dengan Indikator Struktur Birokrasi ini dari pihak Aparat Pemerintah sudah melaksanakan tugas terkait dengan penertiban tamu wajib lapor 1 x24 jam ini sesuai dengan prosedur

dan SOP yang berlaku hal ini di jelaskan oleh Aparat pemerintah dalam proses sosialisasi kepada masyarakat dan dari pihak masyarakat menilai tidak keseluruhan masyarakat mengetahui akan kegiatan yang dijalankan oleh Aparat pemerintah terkait dengan penertiban ini apakah sudah sesuai dengan SOP nya dikarenakan tidak keseluruhan masyarakat yang hadir dalam proses sosialisasi.

Selanjutnya dari Empat Indikator yang telah di uraikan diatas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Terkait Tamu Wajib Laport Disajikan Tabel Rekapitulasi Penilaian Terhadap Jawaban Responden

Tabel V.12. Rekapitulasi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah)

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Komunikasi	9	3	1	13
2	Sumber Daya	12	1	-	13
3	Disposisi	12	1	-	13
4	Struktur birokrasi	11	1	1	13
Jumlah		44	6	2	52
Rata Rata		11	1	1	13
Persentasi		80%	10%	10%	100%

Sesuai Tabel Tersebut dapat dikatakan penilaian Terhadap jawaban Aparat Pemerintah terkait Peran Serta Masyarakat Dapat dikategorikan Terimplementasi, karena 11 dari rata rata 13 orang Responden atau 80% dari total Responden menyatakan baik, sesuai dengan teknik penilaian yang telah dibuat, maka 80 % berada di interval 66%-100%, maka hasil rekapitulasi berdasarkan jawaban dari Responden Aparat pemerintah dinyatakan Terimplementasi.

Sedangkan dilihat dari Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan Responden (Masyarakat) sesuai dengan tabel berikut

Tabel V.13. Rekapitulasi Jawaban Responden (Masyarakat)

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Komunikasi	8	27	15	50
2	Sumber Daya	14	26	10	50
3	Disposisi	10	28	12	50
4	Sumber Daya	9	30	11	50
Jumlah		41	111	48	200
Rata Rata		10	28	12	50
Persentasi		20%	60%	20%	100%

Sesuai Tabel tersebut diketahui penilaian terhadap jawaban tentang keharusan Tau untuk melaporkan dirinya 1 x 24 jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti dapat dikategorikan “Kurang Terimplementasi” .karena Rata rata dari 50 orang Responden yang menyatakan kurang terimplementasi adalah 28 orang dengan persentasi 60%, maka sesuai dengan teknik pengukuran yang telah dibuat dapat diketahui bahwa 60% berada pada interval antara 33%-66% dengan kategori Kurang Terimplementasi.

Selanjutnya dapat dilihat Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan mengenai Implementasi aturan Tamu Wajib Lapor di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti.

Tabel V.14. Rekapitulasi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah,Dan Masyarakat)

No	Indikatorr	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Aparat Pemrintah	11	1	1	13
3	Masyarakat	10	28	12	50
Jumlah		22	29	13	63
Persentase		30%	50%	20%	100%

Sesuai Data tersebut dapat dikatakan penilaian terhadap jawaban tentang Pelaksanaan Peraturan Tentang Ketertiban Umum (Studi Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti) berdasarkan hasil

Rekapitulasi jawaban Responden (Aparatur Pemerintah Dan masyarakat) dapat dikategorikan Kurang Terimplementasi , karena dari 63 orang Responden yang menyatakan pelaksanaan Peraturan ini Kurang Terimplementasi sebanyak 29 orang atau 50%. Maka sesuai dengan teknik pengukuran yang telah dibuat maka dapat diketahui bahwa 50% berada pada interval antara 33% s/d 66% dengan Kurang Terimplementasi.

C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Aturan Tamu Wajib Lapo 1 x 24 Jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti.

Berdasarkan Hasil pengamatan secara langsung dilapangan dan hasil wawancara Bersama Aparat Pemerintah Kecamatan Mandau, Lurah Gajah Sakti, Seksi ketentraman dan Ketertiban umum kelurahan Gajah sakti, RT/RW Kelurahan Gajah Sakti, serta Masyarakat. Diketahui beberapa hambatan yang diperoleh dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, adapun Hambatan yang dihadapi adalah :

1. Banyaknya Masyarakat yang kurang memahami Dan Kurang Menyadari Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.
2. Kurang Teliti dan Kurang Tegasnya RT/RW Dalam men Data Warganya yang datang Untuk menetap tetapi tidak melaporkan dirinya 1 x 24 Jam.
3. Kurangnya Sarana penertiban berupa Pos Ronda, Siskamling, dan Peralatan keamanan bagi Aparat pelaksana Penertiban.
4. Kurang kuatnya Sanksi yang Diberikan sehingga Masyarakat menganggap Enteng Peraturan yang telah dibuat Pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Studi tamu wajib lapor 1 x 24 jam Di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti) dapat dikategorikan Kurang Terimplementasi. ini dapat dilihat dari jawaban dari Responden dari 4 indikator terkait,yaitu Komunikasi,Sumber daya,Disposisi dan Strukur Birokrasi, Yang paling menonjol dari keempat Indikator Tersebut yaitu Terkait indikator Disposisi,karena sikap dari masyarakat yang kurang sadar dan kurang memahai aturan yang telah dibuat dan ditetaokan oleh masyarakat sehingga aturan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan aturan ini yaitu :
 - a. Sikap masyarakat yang kurang memahami Peraturan yang telah dibuat pemerintah serta kurangnya kesadaran Mayarakat yang datang Untuk Menetap tetapi tidak melaporkan DirinYA
 - b. Kurang Teliti dan Kurang tegasnya RT/RW Dalam mendata Warganya yang datang Untuk menetap tetapi tidak melaporkan dirinya 1 x 24 Jam,serta kurangnya pemberitahuan tentang aturan wajib lapor.

- c. Kurangnya sosialisasi dan Pemberitahuan berupa spanduk yang ada di tiap RT, Sehingga Masyarakat Tidak tahu akan aturan Mengenai Tamu wajib Lapor 1 x 24 jam ini
- d. Tidak tersedianya sarana penertiban yang memadai yaitu berupa pos Ronda, Siskamling, dan Peralatan keamanan bagi Aparat pelaksana penertiban.
- e. Kurang kuatnya dan kurang Konsisten nya sanksi yang Diberikan sehingga Masyarakat menganggap enteng peraturan yang telah dibuat Pemerintah.

B. Saran

1. Diharapkan Kepada seluruh Masyarakat Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Harus memperbaiki Sikap agar lebih bisa menyadari dan lebih memahami lagi Peraturan yang dibuat oleh pemetintah, sehingga pelanggaran pelanggaran yang sering terjadi dapat teratasi dan penciptaan ketertiban Umum di kelurahan Gajah sakti terkait tamu wajib lapor 1 x 24 jam bisa berjalan dengan Baik.
2. Diharapkan Kepada RT/RW Kelurahan Gajah Sakti lebih Teliti dan Lebih Tegas lagi dalam mendata warganya yang datang dari daerah lain untuk menetap di daerahnya. serta di setiap Gang harus di buat plang yang bertuliskan Tamu wajib lapor 1x24 jam sehingga masyarakat mengetahui mengenai aturan ini.

3. Disarankan kepada Aparat Pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana mengenai penertiban terkait pos ronda dan pengaktifan kembali siskamling, caranya yaitu masyarakat harus guyub rukun agar keamanan dan ketertiban dapat tercipta.
4. Disarankan Kepada RT/RW setempat harus meningkatkan lagi sosialisasi terkait aturan tamu wajib lapor dan harus membuat pemberitahuan dengan cara membuat spanduk besar tentang aturan yang mengatur Tentang tamu wajib Lapor 1 x 24 jam ini.
5. Harus adanya pemberian sanksi yang kuat dan tegas kepada masyarakat sehingga masyarakat patuh akan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan masyarakat takut untuk melanggar aturan tersebut sehingga pelanggaran pelanggaran yang terjadi yang akan meresahkan warga bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan tertib.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino, Leo. 2008, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Alpeldoore, (dalam Supriyanto, 2009). *Manajemen Pemerintahan*, Tangerang, CV. Media Brilian.
- Assauri, 1999. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Awang, dan Mendra wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Bevir, wasistiono dan simangunsong, 2015. *Metodologi Ilmu pemerintahan Bandung*, IPDN Press.
- Dunn, Wiliam N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edwards III George. 1980. *Implemting Public Policy*. Washington, D.C Robert L. Peabody
- Friedrich (Dalam Wahab 2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers.
- Horn, And Meter (dalam Sujianto 2008). *Implementasi Kebijakan*, Alaf Riau, Graha UNRI Press Pekanbaru
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk, 2005, *Kebijakan dan manajemen Pembangunan wilayah*. Yogyakarta, YPAPI
- Musaneff, Sistem Pemerintahan Di Indonesia, JAKARTA, Penerbit Gunung Agung.
- Mustafa, Delly, 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta
- Mulidiah, Sri, 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan)*. Bandung, Indra Prahasta
- Ndraha, Talidziduhu, 2011. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)* 1. Jakarta, Rineka cipta
- _____, 2011. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)* 2, Jakarta, Rineka cipta
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi dan Evaluasi*, Jakarta. PT Eles Media Kompotindo
- Nugroho D Riant, 2005, *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta Elexmedia
- Rasyid, Ryas (dalam Maulidiah, 2014) *Pelayanan Asminitstrasi terpadu Kecamatan* Bandung, Indra Prahasta
- Ridwan, 2009. *Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian*. Bandung. Alfabeta.

- Ripley Dan Franklin (Dalam Winarno 2012) *Kebijakan Publik* (Teori, Prosedur,dan studi kasus). Jakarta, PT. Buku Seru.
- Suharto, Edi, 2005,*Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Sujianto,2008, *Implementasi Kebijakan*, Alaf Riau, Graha UNRI Press Pekanbaru.
- Strong, C.F (dalam syafiie 2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Adminitrasi*, Bandung, Alfabeta
- Syafiie,Inu Kencana, 2011. *Sistim pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka cipta
- Thoha, Miftah, 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Yogyakarta, Rajawali Pers.
- Werella (dalam maulidiah,2014).(*Pelayanan Asminitstrasi terpadu Kecamatan*) Bandung, Indra Prahasta
- Winardi, 1990. *Asas asas Manajemen* , Bandung : Mandar maju
- Winarno, Budi, 2012. *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori, Proses, dan Studi kasus)* Jakarta, PT. Buku seru

Dokumentasi :

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .
- Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik .
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum..